



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
KOMISI III DPR RI
RAPAT KERJA DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME REPUBLIK INDONESIA**

Tahun Sidang	:	2022-2023
Masa Persidangan	:	I
Rapat ke-	:	-
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Dengan	:	Menteri Hukum dan HAM RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Senin, 4 September 2023
Pukul	:	10.06 s.d. 12.32 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi III DPR RI Gedung Nusantara II DPR RI Lantai 1, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Ketua Rapat	:	Ir. Pangeran Khairul Shaleh, M.M./Wakil Ketua Komisi III DPR RI/F-PAN.
Acara	:	1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2022; 2. Hapsem BPK Tahun Anggaran 2022; dan 3. Pembahasan RKA K/L Tahun Anggaran 2024 beserta usulan program.
Sekretaris Rapat	:	Novianti, S.E. (Kepala Bagian Sekretariat Komisi III DPR RI)
Hadir	:	A. Anggota: 38 dari 53 orang Anggota dengan rincian:

Pimpinan:

1. Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A. (Ketua/F-PIDP);
2. Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M. Hum (Wakil Ketua/F-PG);
3. Dr. Habiburokhman, S.H., M.H. (Wakil Ketua/F-P. Gerindra);
4. H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I. Kom (Wakil Ketua/F-P. NASDEM);

5. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M. (Wakil Ketua/F-PAN).

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan:

7 dari 11 orang anggota:

1. Ichsan Soelistio
2. Drs. M. Nurdin, M.M.
3. Dede Idra Permana, S.H.
4. H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H.
5. I Wayan Sudirta, S.H.
6. Novri Ompusunggu, S.H., M.H.
7. Irjen Pol (Purn) Drs. H. Safaruddin

Fraksi Partai Golongan Karya:

4 dari 7 orang Anggota:

1. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S. S os., M.Si.
2. Ir. Hj. Sari Yuliati, M.T.
3. H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E.
4. Supriansa, S.H., M.H.

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya:

5 dari 6 orang Anggota:

1. Wihadi Wiyanto, S.H., M.H.
2. Dr. Romo H.R. Muhammad Syafi'i, S.H., M. Hum.
3. Hj. Siti Nurizka Puteri Jaya, S.H., M.H.
4. H. Rahmat Muhajirin, S.H.
5. Bimantoro Wiyono, S.H.

Fraksi Partai Nasional Demokrat:

3 dari 4 orang Anggota:

1. Eva Yuliana, M.Si.
2. H. Taufik Basari, S.H., M. Hum., L.L.M.
3. Drs. Y. Jacky Uli, M.H.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa:

2 dari 5 orang Anggota:

1. N. M. Dipo Nusantara Pua Pua, S.H., M.Kn.
2. H. Heru Widodo, S. Psi.

Fraksi Partai Demokrat:

4 dari 5 orang Anggota:

1. Dr. Hince IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS.
2. H. Santoso, S.H., M.H.
3. H. Agung Budi Santoso, S.H., M.H.
4. Dr. Benny Kabur Harman, S.H.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera:

3 dari 4 orang Anggota:

1. Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, S.E.
2. H. M. Nasir Djamil, M.Si.
3. Dr. H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H. M.Si.

Fraksi Partai Amanat Nasional:

3 dari 3 orang Anggota:

1. Dr. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H.
2. H. Nazaruddin Dek Gam
3. Mulfachri Harahap, S.H., M.H.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan:

2 dari 1 orang Anggota:

1. Dr. H. Ach. Baidowi, S. Sos., M.Si.
2. Dr. H. M. Amir Uskara, M. Kes.

B. Undangan:

1. Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan HAM) beserta jajaran;
2. Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. (Wakil Menteri Hukum dan HAM RI) beserta jajaran;
3. Prof. Dr. H. Rycko Amelza Dahniel, M.Si. (Kepala BNPT) dan jajaran.

Anggota Izin : **F-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**
- Trimedya Panjaitan, S.H., M.H.
- H. Agustiar Sabran, S. Kom.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SHALEH, M.M.):

Pak Menteri kita mulai ya.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatulahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,*

Yang saya hormati Komisi III DPR RI, Menteri Hukum dan HAM, Wakil Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajaran,
Yang kami hormati Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan jajaran.

Jaketnya cakep ini, Pak, iya. Mestinya Pimpinan dikasih ini, sama anggota.

Bapak-Ibu hadirin yang kami muliakan,

Alhamdulillah wa syukurillah kita disehatkan oleh Allah bisa bekerja, berkarya sesuai tugas dan fungsi kita dan pada hari ini kita dipertemukan dalam rangka pelaksanaan fungsi anggaran. Menurut laporan Seketariat, berdasarkan daftar hadir, yang telah hadir 15 dari 53 anggota Komisi III DPR RI dan 5 fraksi dari 9 fraksi. ... karena kuorum masih belum memenuhi, rapat saya skor 5 menit dulu.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 10.00 WIB)
(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 10.05 WIB)**

Ibu, hadirin yang berbahagia,

Heru baru masuk *nih*, langsung korum, Pak, 6 fraksi.

Kami menyampaikan terima kasih kepada Menteri Hukum dan HAM dan Kepala BNPT beserta seluruh jajaran atas kesediaannya memenuhi undangan kami. Kami ingin menyampaikan agenda rapat pada hari ini:

- Pertama penjelasan Laporan Keuangan Pemerintah Tahun Anggaran 2022, Tindak lanjut atas Hasil Pemeriksaan Semester I dan II BPK RI Tahun Anggaran 2022, dan RKA K/L Tahun 2024 beserta usulan programnya.
- Kedua, diskusi atau tanya jawab,
- Ketiga, penutup.

Kami juga ingin mendapatkan persetujuan, apakah rapat pada hari ini bisa kita akhiri maksimal pukul dua belas?

(RAPAT: SETUJU)

Hadirin yang berbahagia,

Komisi III DPR RI melaksanakan rapat terkait fungsi anggaran ini berdasarkan surat Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor B-807/AGI.05.01/08/2023, tanggal 12 Juli 2023, perihal: Penyampaian rancangan jadwal pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2022 dan rancangan jadwal pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun 2024.

Sesuai pasal 59 ayat 2 huruf h dan huruf l serta Pasal 176 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan sesuai dengan surat Pimpinan Badan Anggaran DPR RI maka dalam rangka melaksanakan fungsi

anggaran, Komisi III ini mendapatkan penjelasan dari mitra kerja terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2022 dan Hasil Pemeriksaan Semester Hasil Pemeriksaan Semester I-II BPK RI terhadap pemerintah pada tahun anggaran 2022 yang lalu sehingga hampir semua mitra kerja Komisi III terdapat catatan-catatan yang perlu sama-sama kita tindak lanjuti.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2022 bahwa pagu anggaran Kemenkumham Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp16.798.538.757.000, realisasi sebesar 95,25%. Pagu anggaran BNPT tahun 2022 sebesar Rp429.412.163.000, realisasi sebesar 98,89%.

Kemenkumham dan Kepala BNPT,

Berkaitan dengan RKA-K/L Tahun Anggaran 2024 beserta usulan anggarannya dapat kami sampaikan bahwa:

1. Kementerian Hukum dan HAM

Pagu indikatif tahun 2024 sebesar Rp18.198.813.941.000.

Usulan tambahan tahun 2024 sebesar Rp2.229.757.634.000.

Di pagu indikatif setelah usulan tambahan tahun anggaran 2024 sebesar Rp20.428.571.575.000 di nota keuangan tahun anggaran 2024 sebesar Rp18.398.813.941.000;

2. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Pagu indikatif tahun 2024 sebesar Rp430.143.141.000.

Usulan tambahan tahun 2024 sebesar Rp459.092.523.700.

Pagu indikatif setelah usulan tambahan tahun 2024 sebesar Rp886.239.664.700 di nota keuangan tahun 2024 sebesar Rp465.227.141.000.

Dari RKA K/L tahun 2024 ini, Komisi III ingin mendengarkan penjelasan mitra kerja apakah ada usulan tambahan program dan tambahan anggaran tahun 2024 dari dana hibah. Untuk itu, kami persilakan Menkumham untuk memberikan penjelasannya dan dilanjutkan Kepala BNPT, masing-masing diberikan waktu 15 menit.

F-PDIP (DRS. M. NURDIN, M.M.):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SHALEH, M.M.):

Silakan.

F-PDIP (DRS. M. NURDIN, M.M.):

Nurdin dari PDI Perjuangan.

Saran saja, Pak, ini mengingat waktu karena kita juga sampai malam suda ada pekerjaan. Bagaimana kalau laporan keuangan pemerintah, kan, sudah kita setuju, Pimpinan, hasil pemeriksaan juga sudah bisa kita baca. Jadi, mitra kerja jelaskan saja penyerapan tahun anggaran sekarang dan apa yang dilakukan tahun 2024. Bahwa nanti dalam tanya-jawab, bisa kita bebas untuk menanyakannya. Ini untuk mempersingkat waktu dalam pemaparan mitra kerja.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (IR. PANGERAN KHAIRUL SHALEH, M.M.):

Baik. Jadi, secara *highlight* saja yang sudah Bapak tulis dalam ini..., buku ini. Yang penting program 2024, Pak Menteri.

Silakan, Pak Menteri.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PROF. YASONNA H. LAOLY, S.H., M.SC., P.HD.):

Terima kasih, Pak Ketua.

**Pimpinan dan Anggota,
Pak Ketua Komisi, Pak BP, yang memberikan mandat kepada Pak Pangeran untuk memimpin rapat ini,
Pak Sahroni, Pak Habiburokhman,
Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,**

Terima kasih atas kesediaannya untuk Rapat Kerja membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2022, Hasil Pemeriksaan Semester I dan II BPK (Hapsem) 2022, dan yang penting RKA K/L dan usulan program tahun 2024.

Terima kasih usulan Pak Nurdin karena bahan sudah kami serahkan, baik yang laporan *summary* maupun yang *full* untuk kesempatan ini.

Sebelum saya me..., secara *highlight*, dalam pengelolaan keuangan, saya bisa menyampaikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM mendapat penghargaan kinerja anggaran terbaik kedua kementerian/lembaga berpagu besar. Jadi, kita itu peringkat kedua setelah Kementerian Keuangan. Jadi, enggak, enggak jelek, bagus, dan WTP-nya itu sudah 14 kali berturut-turut. Kalau tahun depan kita memperoleh WTP sekali lagi, berarti 15 berturut-turut.

Berarti kita sudah dapat *golden*, penghargaan emas ini. Kami akan berupaya keras, Pak Ketua, agar tahun depan kami dapat WTP sehingga kami dapat penghargaan..., penghargaan emas dalam pengelolaan keuangan negara. dan dari hasil pemeriksaan keuangan BPK, rekomendasinya kami sudah tindak lanjuti 91,80%. Salah satu yang tertinggi antara kementerian/lembaga yang menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK.

Baik, Bapak-Ibu sekalian,

Satu hal, berikutnya saya hanya *highlight* yang penting saja. Kalau pemeriksaan Hapsem sudah tahun 2022 pada umumnya sudah kita selesaikan dan berkali-kali rapat. Hanya mengenai PNBPN, saya bisa sampaikan bahwa tahun 2022 itu kita mencapai target lebih 171% dan yang terbesar itu adalah dari imigrasi, walaupun itu Covid, kita dapat 0,6 triliun PNBPN dan itu sebabnya salah satu rekomendasi BPK kepada Kementerian Hukum dan HAM tentang bebas visa mengkhawatirkan bahwa jika bebas visa, rezim bebas visa tanpa selektif, tanpa resiprokal akan bisa mengurangi PNBPN kita secara signifikan nanti di imigrasi maka untuk itu kita akan selalu berhati-hati dalam soal ini, Pak Ketua.

Dan, untuk anggaran 2024, Pak Ketua, di *slide* ke 20, pagu anggaran yang kita usulkan itu 24 triliun, di *slide* 24, eh, 20, tahun 2024 itu 24 triliun. Kemudian, melalui surat bersama Menkeu dan Bappenas disepakati pagu indikatifnya menjadi 18,198 miliar, 18.198.813.000.000.

Untuk itu, kami mengajukan surat tanggal 26 Mei 2023 tentang usulan tambahan anggaran pagu indikatif tahun 2024 sebesar dua koma..., 2,2 triliun 2.229.757.000.000, tetapi hanya dipenuhi dari usulan 2,2 triliun, hanya dipenuhi 200 triliun. Jadi....

PESERTA RAPAT DARI KEMENKUMHAM:

Dua ratus miliar.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PROF. YASONNA H. LAOLY, S.H., M.SC., P.HD.):

Dua ratus miliar, *sorry*.
Dua ratus triliun kita sudah pesta pora.

Sorry miss..., apa..., slip of the tongue kata orang Inggris.

Jadi, pagu anggaran kami itu sekarang hanya 18, 3..., 18.398.813.000.000. Berarti belum dipenuhi sekitar dua triliun.

Penambahan anggaran yang sekarang, alokasi yang kita mau gunakan yang 200 miliar akan digunakan untuk pembangunan kantor imigrasi, yang telah mendapat izin ada 4 dan beberapa program lainnya.

Dalam program tahun 2024 ada dukungan manajemen pagu anggarannya 13,1 ya, karena ada penambahan 200 miliar, penegakan dan pelayanan hukum 5,1 triliun, pembentukan regulasi 36 miliar, pemajuan dan penegakan HAM dua puluh satu koma..., 21 miliar koma enam ratus dua puluh dua ..., enam puluh dua juta. Jadi, seluruhnya Pagu Anggaran 2024 Kementerian Hukum dan HAM 18.3..., 18 triliun 98 miliar. Dari program itu, belanja pegawai itu sekitar 59%, belanja operasional kantor pusat dan wilayah karena Kementerian Hukum mempunyai 33 kantor wilayah dan kantor pusat itu 15%, belanja tusi seluruh satker 14%, sekitar 1,9, sarpras pemasyarakatan 1,1 triliun atau 8,49%, sarpras imigrasi 200 miliar, 1,52%.

Jadi, pagu anggaran berdasarkan jenis belanja seperti yang terlihat dalam *slide* 22, dapat kita lihat dari yang 18,3 triliun itu dapat digunakan untuk belanja pegawai, bama, kebutuhan dasar, sarpras pemasyarakatan, belanja tusi, pembangunan kanin, pemeliharaan sistem keimigrasian prioritas nasional. Dari PNBP itu, belanja tusinya, tugas dan fungsi, 2,6 triliun sekitar 14,6%, paspor dan izin tinggal 654%, dan prioritas nasional 3,6%.

Jadi, Bapak-Ibu sekalian, karena itu usulan pergeseran anggaran antar program dari dukungan manajemen ke program pembentukan regulasi kita tambah ya, karena kekurangan karena kita tentunya banyak peraturan perundang-undangan yang akan kita bahas nantinya, ada kekurangan di situ 7,3 miliar. Dengan demikian pembentukan regulasi menjadi 43,9 miliar rupiah.

Target PNBP, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat target PNBP Kementerian Hukum dan HAM, pada *slide* 24.

Pada tahun 2022 dirjen imigrasi itu targetnya 2 triliun, tahun 2023, seperti tadi katakan target 2022 itu 2 triliun, kita dapat..., seperti yang saya laporkan tadi, PNBP kita itu empat koma sekian triliun tahun 2022. Jadi, itu penambahan 171%. Di target 2023 2,3, per saat ini kita sudah 4,7 triliun. Per saat ini, Pak. Jadi, di 2023 akhir nanti, kemungkinan besar PNBP imigrasi itu akan melonjak cukup signifikan, cukup signifikan. *Nah*, di target 2024 pagu indikatifnya itu 3 triliun, di pagu anggarannya 5,8 triliun.

Kita lihat di sini memang terjadi terus peningkatan PNBP, baik di Ditjen AHU, di ditjen KI, di Ditjen PAS, ini kecil-kecil hanya karena ada penyewaan-penyewaan, ada sewa tanah, dan lain-lain. Di ditjen PP ada PNBP dari regulasi yang lain-lain, tetapi yang signifikan adalah 3 besar itu adalah yang paling besar adalah imigrasi, diikuti dengan di Ditjen AHU.

Pagu anggaran 2024, imigrasi ditargetkan 5,8 triliun, di Dijten AHU satu koma sekian triliun, Ditjen KI 900 miliar. *Nah*, sekarang saja, walaupun kita target 2024, seperti saya sampaikan, di 2023 saja per hari ini sudah 4,7 triliun dan di akhir tahun mungkin, akan sangat mungkin di atas 7, mungkin lebih triliun. Jadi, ini merupakan hal yang baik dan kami minta dukungan daripada Komisi III untuk terus mengembangkan sistem dan fasilitas-fasilitas keimigrasian agar pelayanan publik kami tentang ini dapat dilakukan.

Dan, Pak Ketua, sesuai dengan surat Kementerian Keuangan, sekarang, kalau dulu PNBPN itu hanya digunakan oleh satker induknya, sekarang sudah bisa dibagi dan Sekjen nanti yang akan..., jadi sebagian dari PNBPN itu dapat digunakan untuk penguatan regulasi, pelayanan hukum, dan lain-lain. Ini yang untuk meningkatkan pelayanan hukum di Kementerian Hukum dan pelayanan masyarakat, dan pelayanan publik.

Jadi, Bapak-Ibu sekalian, ini yang dapat kami sampaikan. Untuk menyingkat waktu karena sesuai saran Pak Ketua tadi 15 menit, ya, kurang-kurang pas sedikitlah supaya ada waktu tanya jawab. Mohon dukungannya Pak Ketua dan Anggota Komisi yang terhormat agar kami..., target kami untuk penambahan anggaran pada penetapan anggaran nanti di bulan September kita bisa putuskan, Kementerian Hukum dan HAM masih dapat tambahan pada anggaran Kementerian Hukum dan HAM.

Saya kira demikian, Pak Ketua, terima kasih atas laporannya.

Wallahul mu'afiq ila aqwamin tariq.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (IR. PANGERAN KHAIRUL SHALEH, M.M.):

Wa'alaikumussalam.

Ini asli.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PROF. YASONNA H. LAOLY, S.H., M.SC., P.HD.):

Ini karena PKB dan apa... (suara tidak jelas), Pak.

KETUA RAPAT (IR. PANGERAN KHAIRUL SHALEH, M.M.):

Iya, *bener*, setuju, Pak Menteri. Biar..., PKB banget ini Pak Menteri kita ini.

Pak Menteri, 10 menit, mantap.

Silakan, Pak BNPT, silakan.

**KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
(KOMJEN POL. PROF. DR. H. RYCKO AMELZA DAHNIEL., M.SI.):**

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang kami hormati Pimpinan Komisi III DPR Republik Indonesia,
Yang terhormat anggota Dewan Komisi III DPR yang hadir pada rapat
pada pagi hari ini,**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan, dan
salam Pancasila,

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan rindo-Nya pada pagi hari ini kita dapat menghadiri rapat kerja dengan Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi III DPR Republik Indonesia.

Pertama-tama tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi III DPR RI atas dukungan kerjasama yang baik selama ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas undangan rapat kerja pada pagi hari ini.

Adapun pokok-pokoknya, tadi sama dengan disampaikan oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM, ada tiga, poin sesuai dengan surat undangan rapat kerja.

Oleh karena itu, izinkan dalam kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisi III DPR RI bahwa dimulai tahun 2013, BNPT Republik Indonesia mulai memiliki bagian anggaran sendiri dan membuat laporan keuangan mandiri, dan sejak tahun itu pula BNPT telah berhasil meraih perdikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK Republik Indonesia selama 10 kali berturut-turut, sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2022. *Alhamdulillah*, puji Tuhan, *Insyallah* kami akan terus menjaga prinsip anggotabilitas dalam pengelolaan anggaran negara di BNPT.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang kami hormati,

Izinkan kami untuk melaporkan keuangan BNPT Tahun Anggaran 2022. Pada Tahun Anggaran 2022, BNPT mendapat alokasi anggaran sebesar 453,8 miliar. Kemudian mengalami *automatic adjustment* dari Kemenkeu sebesar 31,9 miliar sehingga pagu anggarannya berkurang menjadi 421,8 miliar. Pada semester kedua, tahun 2022, BNPT mendapatkan persetujuan relaksasi *automatic adjustment* sebanyak 2 kali, yaitu sebesar 7,5 miliar, sehingga DIPA terakhir BNPT menjadi 429,4 miliar.

Adapun realisasi atau penyerapan anggaran BNPT Tahun Anggaran 2022 sebesar 98,89% atau 424,6 miliar. Dengan rincian pada belanja pegawai terserap 94,62% atau 48,3 miliar dari 51,1 miliar. Terdapat sisa 2,7 miliar, sebagai alokasi belanja pegawai PPK yang dianggarkan di tahun 2022, namun baru bisa dilaksanakan di tahun 2023.

Kemudian, pada belanja barang, realisasi 99,5% atau 370,4 miliar dari R372,3 miliar. Masih terdapat sisa 1,8 miliar sebagai tindakan efisiensi atas pelaksanaan metode kegiatan oleh unit kerja di BNPT. Efisiensi terjadi karena penghematan pada belanja yang melalui mekanisme langsung bendahara pada proses pengadaan barang dan jasa.

Sebagai contoh, dalam perjalanan dinas terdapat penyesuaian perubahan harga hotel karena menyesuaikan dengan *government rate* dan juga terjadi pengurangan jumlah daripada peserta. Selain itu, efisiensi juga terjadi karena penyesuaian penggunaan jenis transportasi di mana pada saat pandemic, perjalanan yang semula dilakukan dengan pesawat udara, yang harganya lebih tinggi, dirubah menggunakan transportasi darat sehingga sisa anggaran yang tidak terpakai tersebut harus dikembalikan.

Kemudian, pada belanja modal terserap 97,28% atau 5,7 miliar dari 5,9 miliar. Masih terdapat sisa 162,5 juta karena adanya peningkatan efektivitas dari pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang berdampak kepada meningkatnya efisiensi anggaran belanja modal.

Pimpinan sidang dan Anggota Komisi III DPR RI yang kami banggakan,

Selanjutnya, kami laporkan secara singkat Hasil Pemeriksaan Semester BPK Tahun Anggaran 2022 yang menjelaskan tentang temuan BPK pada laporan keuangan BNPT di tahun anggaran 2021. Dari dua kluster, sistem pengendalian intern dan kluster kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, seluruhnya telah tuntas 100% ditindaklanjuti oleh BNPT.

Kemudian, kami akan langsung kepada rancangan rencana kerja atau RKA K/L Tahun Anggaran 2024.

Bapak Pimpinan Sidang dan Anggota Komisi III DPR RI yang kami hormati,

Selanjutnya, kami akan melaporkan tentang tahun anggaran 2024, BNPT mendapatkan pagu indikatif sebesar R430,1 miliar yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan pada tanggal 10 April 2023 yang lalu. Kemudian, pada tanggal 15 Juni 2023, BNPT mengajukan usulan penambahan anggaran sebesar 456 miliar sehingga jumlahnya menjadi 886 ,2 miliar agar tugas-tugas BNPT dapat dikerjakan secara optimal.

Sebagaimana telah kami laporkan dalam Rapat Kerja BNPT dengan Komisi III DPR RI tanggal 7 Juni yang lalu, namun usulan dari 450 miliar tersebut hanya disetujui sebesar 35,08 miliar sehingga pagu anggaran BNPT ditetapkan menjadi sebesar 465,2 miliar.

Adapun tambahan anggaran sebesar 35,08 miliar tersebut dialokasikan untuk penguatan kegiatan sebagai berikut: untuk kegiatan deradikalisasi dalam lapas dan lapas khusus terorisme; untuk asesmen perlindungan objek vital transportasi dan lingkungan dari tindak pidana terorisme; yang ketiga untuk asesmen pengamanan terhadap fasilitas publik dari tindak pidana terorisme; operasi intelijen siber dan teknologi informasi; kerjasama regional dan multilateral; koordinasi peran serta masyarakat dan pemerintah dalam pencegahan terorisme; dan penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Berdasarkan pagu anggaran Tahun Anggaran 2024 tersebut, BNPT telah menyusun rancangan Rencana Kerja Tahun 2024 yang merujuk kepada Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dengan tema mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, di mana di dalamnya terdapat dua program, yaitu program teknis program pendahuluan terorisme yang mendapatkan anggaran Rp284,06 miliar dan yang kedua program generik, yaitu program dukungan manajemen yang mendapatkan anggaran 181,1 miliar. Jika ditinjau dari satuan tiga maka Pagu Anggaran BNPT anggaran 2024 yang sebesar 465,2 miliar terdiri dari belanja pegawai sebesar 52,6 miliar, belanja barang 411,5 miliar, dan belanja modal 1,06 miliar.

Pagu anggaran tersebut sesuai dengan Rancangan Kerja BNPT akan digunakan untuk: yang pertama, program penanggulangan terorisme melalui bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi sebesar 166,8 miliar yang digunakan untuk 12 kegiatan; kemudian yang kedua, dalam bidang penindakan, pembinaan kemampuan dengan anggaran 96,8 miliar dengan delapan kegiatan; dan yang ketiga, bidang kerjasama internasional dengan anggaran 20,3 miliar dengan tiga kegiatan; kemudian, program dukungan manajemen, yaitu untuk dukungan administrasi dan SDM dengan anggaran 179,06 miliar dengan 20 kegiatan dan layanan, dan kegiatan pengawasan

internal dengan anggaran sebesar 2,1 miliar dengan volume output dua dokumen.

Pimpinan Sidang dan Anggota Komisi III yang kami hormati,

Selanjutnya, izinkan kami untuk memberikan gambaran rancangan dukungan anggaran ideal BNPT RI di tahun 2024. Sebagai *leading sector* penanggulangan terorisme di Indonesia, BNPT berkomitmen untuk melawan paham dan aksi terorisme sesuai dengan mandat undang-undang nomor 5 tahun 2018.

Adapun kebutuhan anggaran yang ideal untuk menjalankan tugas dan fungsi BNPT tersebut adalah sebagai berikut: anggaran ideal untuk menggunakan..., anggaran yang ideal dengan menggunakan struktur organisasi yang ada saat ini, yang ideal adalah 886,2 miliar, sebagaimana pernah kami sampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI tanggal 7 Juni 2023 yang lalu. Namun, pagu anggaran yang setuju hanya sebesar 465,2 miliar saja.

Kemudian, yang kedua, saat ini BNPT telah mengusulkan SOTK baru sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 di mana terjadi peningkatan tupoksi BNPT, yang tadinya hanya bertugas mengkoordinasikan saja, namun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, BNPT juga merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan pengembangan SOTK. Ini tentunya akan berimplikasi kepada pengembangan struktur organisasi, penambahan jumlah personel dan kompetensinya, pemenuhan sarpras perkantoran, pembangunan pusdiklat, dan pembangunan pusdalsis sebagai fasilitas bagi Bapak Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani terorisme sehingga simulasi kebutuhan anggaran BNPT dengan SOTK yang baru.

Yang pertama adalah dengan pembangunan pusdiklat jumlahnya menjadi 1,5 triliun di mana untuk pembangunan pusdiklat memerlukan biaya kurang lebih 59,3 miliar, termasuk dukungan pembangunan gedung subaguna untuk pusdiklat, yaitu 58,8 miliar.

Kemudian, yang berikutnya, dengan SOTK baru, jika ditambah dengan pembangunan pusdalsis jumlahnya menjadi 2,3 triliun rupiah. Di mana biaya pembangunan Pusdalsis sendiri kurang lebih 794,7 miliar, yang terdiri daripada pembangunan data center, *command center*, dan monitoring center yang didukung dengan 9 kompetensi khusus SDM Pusdalsis dan diawaki sekurangnya 77 personel. Untuk pembiayaan Pusdalsis ini kami menunggu dan mengikuti kebijakan dan arahan dari Bappenas dan kementerian keuangan.

Pimpinan Sidang dan Anggota Komisi III yang kami hormati,

Kami juga ingin melaporkan bahwa BNPT juga menyelenggarakan dua program prioritas nasional dengan alokasi anggaran 53,4 miliar dengan rincian kegiatan sebagai berikut. Untuk pembiayaan forum koordinasi pencegahan terorisme yang ada di tiap-tiap provinsi, alokasi anggarannya 46,06 miliar dan kegiatan kesiapsiagaan nasional dengan alokasi anggaran 7,4 miliar.

Selanjutnya, kami juga mengusulkan, dalam rangka penguatan ketahanan nasional terhadap ideologi terorisme, radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan, serta meningkatkan *public awareness* dan *public engagement* di tengah masyarakat, kami menyusun enam program prioritas di dalam RAN PE sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021.

Yang pertama adalah Program Prioritas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Remaja, di mana hasil penelitian I-KHub (Indonesia Knowledge Hub) BNPT Outlook 2023 yang didukung oleh 91 peneliti dan NGO dalam dan luar negeri menunjukkan bahwa kelompok rentan, yaitu perempuan anak dan remaja menjadi sasaran radikalisme, baik secara *online* maupun *offline*. Kemudian, yang kedua adalah pembangunan desa siap-siaga, desa damai, dalam rangka membangun ketahanan desa yang toleran dan mampu mencegah masuknya ideologi radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.

Kemudian, yang ketiga, pembangunan sekolah damai dalam rangka membangun ketahanan sekolah yang toleran, moderasi beragama, dan memiliki ketahanan terhadap masuknya ideologi radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Kemudian, yang keempat adalah peningkatan asesmen pegawai, terutama pegawai negeri, pegawai di lingkungan BUMN dengan tugas resiko yang tinggi, terutama di objek-objek vital nasional yang dapat menyebabkan tindakan sabotase dengan jumlah korban yang sangat besar, kerugian negara yang besar, serta akan mengganggu perekonomian nasional.

Yang kelima, program reedukasi terhadap keluarga napiter, khususnya kepada anak-anak napiter atau mantan natiper yang sudah keluar dari lembaga pemasarakan, dalam rangka memutus jaringan sosial akar ideologi teroris yang diturunkan atau diajarkan dari orang tua kepada anak-anak mereka dengan menempatkan anak-anak mereka di sekolah Islam yang moderat di bawah kontrol BNPT, dan yang keenam adalah program pemberdayaan penyintas dan keluarga. Untuk keenam program prioritas ini kami membutuhkan dukungan anggaran sebesar 46,4 miliar.

Bapak Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi III DPR RI yang kami hormati,

Demikianlah laporan kami, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas dukungan, perhatian dan kerjasama yang baik dari Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi III DPR RI selama ini. Mari kita wujudkan Indonesia yang damai, Indonesia tanpa kekerasan, Indonesia Harmoni.

(PENANYANGAN VIDEO)

Kami sampaikan pesan damai dari Putri Aryani, demikian.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Om Santi Santi Santi Om,
Salam Pancasila!*

PESERTA DARI BNPT:

Salam Pancasila

KETUA RAPAT (IR. PANGERAN KHAIRUL SHALEH, M.M.):

Terima kasih, Pak Rycko. Tepat 14 menit.

Bapak-Ibu, Hadirin yang berbahagia,

Kita telah mendengarkan penjelasan Pak Menteri beserta Kepala BNPT. Kepada kawan-kawan yang ingin menyampaikan pertanyaan, ingin minta penjelasan, kami kasih kesempatan per fraksi dulu, sesuai kesepakatan. Nanti kita, kalau waktunya ada, semua dapat kesempatan, 5 plus 1 ya.

Silakan fraksi PDIP.F-PDIP (IRJEN POL (PURN) DRS. H. SAFARUDDIN):

Saya, Pak.

KETUA RAPAT (IR. PANGERAN KHAIRUL SHALEH, M.M.):

Silakan, Pak Jenderal.

F-PDIP (IRJEN POL (PURN) DRS. H. SAFARUDDIN):

Iya, Pak, *makasih*.

Pak Nurdin nggak enak, Pak, *nanya* sama Pak Menkumham, Pak.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi,*

Salam sejahtera bagi kita sekalian,
Shallom,
Om swastiastu,

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi III,
Anggota Komisi III,
Bapak Menkumham, beserta seluruh staf-staf yang ada yang hadir,
Bapak Kepala BNP,**

Iya, Pak. Kami pertama ke Bapak Menkumham, tentang masalah peningkatan PNBPN ini, Pak. Kalau tadi disampaikan akan terjadi peningkatan pada tahun 2024, eh, 2024 ini, Pak, *nah*, mohon dukungan begitu, Pak, dari Komisi III.

Yang kami mungkin..., apa *sih* sebetulnya yang perlu dukung konkretnya *gitu*, Pak, dukungan yang harus kita..., eh, laksanakan. Yang jelas, kita akan mendukung sepenuhnya, Pak Menkumham, untuk dari..., untuk meningkatkan PNBPN-nya, Pak, terutama dari fraksi PDI Perjuangan, Pak, kami akan mendukung penuh. *Cuman*, konkretnya seperti apa sehingga betul-betul bisa terwujud sesuai dengan target yang diharapkan itu, Pak.

Kemudian, untuk BNPT. BNPT ini kan ada anggaran usulan anggaran program prioritas, ada enam, Pak, untuk BNPT. Yang saya tidak lihat dari program prioritas ini, yaitu BUMN, *gitu*, Pak, program untuk BUMN. Kan, kemarin kan terjadi radikalisme dan dari BNPT juga kemarin *tuh* juga ada di *Tik Tok* kalau nggak salah itu bahwa di Telkom kita sudah disusupi, di wilayah-wilayah Telkom, kemudian di Pertamina.

Ya, memang kalau kami di Kalimantan Timur, Pak, di Kalimantan Timur itu ada masjid di Balikpapan itu, Pak. Itu masjidnya Pertamina, tapi tiap hari mengkritik pemerintah di situ, Pak, di dekat lapangan Merdeka itu, Pak. Ada masjid di sana punya Pertamina tiap hari, tiap 5 waktu mengkritik pemerintah di situ, padahal itu punyanya Pertamina.

Nah, ini mungkin saran kami juga menjadi prioritas untuk BUMN karena BUMN ini kan juga sudah disusupi. Kemarin kan sudah terbukti Kereta Api itu kan, Pak, Kereta Api.

Saran saya, termasuk BUMN mungkin, Pak, untuk menjadi sasaran prioritas dari enam itu.

Saya akhiri, Pak, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (IR. PANGERAN KHAIRUL SHALEH, M.M.):

Terima kasih.

Mas Rano, silakan.

Ini dari Fraksi PKB, Pak Menteri. Temannya Pak Menteri, *nih*.

F-PKB (H. MOH. RANO AL FATH, S.H., M.H.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan dan anggota Komisi III yang saya hormati,
Pak Menteri,
Pak Kepala BNPT, dan
Seluruh jajarannya yang saya muliakan, saya hormati,**

Pertama, bahwa saya ke Menteri Kumham dulu. Bahwa selamat, Pak Menteri, WTP terus ya, Pak, luar biasa. Artinya, setiap temuan ini sudah dijalankan sesuai dengan arahan dari BPK. Tadi Pak Nurdin sebetulnya sampaikan, kita tidak ingin terlalu membahas itu, tapi memang saya harus mulai membahas dari berapa temuan BPK yang hari ini, kalau datanya itu sebetulnya ini terkait tentang pendapatan PNBPN, karena ini cukup besar.

Saya sebetulnya tertarik karena memang di temuan BPK ini, kan, Pak Menteri paham juga bahwa persoalan hukum rata-rata juga dimulai dari adanya temuan BPK. Karena di banyak tempat, temuan BPK ini potensinya, satu, merugikan negara; yang kedua, juga dapat pastinya mengurangi pendapatan PNBPN.

Contoh, misalnya, sedikit saja saya masuk di temuan BPK terkait tentang peralatan dan mesin di Dirjen Pas yang dalam kondisi rusak dengan nilai 298 miliar. *Nah*, ini penjelasan Pak Menteri nanti seperti apa? Karena tadi, Pak, terkait anggaran pun, memang kita akan adanya penambahan di Dirjen Pas. Enggak masalah kalau memang kita dorong anggaran untuk peningkatan di Dirjen Pas karena memang kita enggak mau lihat lagi ada lapas yang terbakar, lapas yang memang tidak layaklah bagi penghuni lapasnya, tidak masalah. Tapi, memang adanya temuan ini seperti apa, Pak Menteri? Apakah memang alatnya rusak, alatnya tidak bisa dipakai, atau seperti apa? Itu satu.

Yang kedua, ini ada temuan lagi terkait persoalan tanah. Ini kebetulan masuknya wilayah Tangerang, ini dapil saya. Ini sudah berulang dari..., setahu saya 2019 ada temuan ini. Saya enggak tahu tindak lanjutnya seperti apa. Di sini memang asetnya Menteri Kumham ini di sini banyak. Ada 139 satker, aset tanahnya kurang lebih seluas 172 hektare.

Temuannya di sini, satu bahwa ada diduga akan kurangnya diterimanya di kas negara sebesar 8,8 miliar terhadap PNBPNya. Oke, itu satu. Yang kedua, masih banyaknya tanah yang berstatus sengketa dan berpotensi disalahgunakan oleh pihak lain sehingga PNBPNya belum bisa didapatkan.

Nah, ini..., ini penjelasan seperti apa, Pak Menteri karena memang dari 2019 terus berulang. Saya enggak tahu apa yang membuat sulit penyelesaian di situ karena memang tanah ini nilainya cukup besar, 775 miliar. Ini kalau bisa menjadi..., apa..., potensi pendapatan PNBPNya bagus. Yang kedua, jangan sampai tanah ini digunakan oleh orang-orang yang memang tidak berwenang. Pasti ada temuan hukum ini di sini. *Nah*, saya minta Pak Menteri menjelaskan dengan jelas karena memang dulu saya sempat tanyakan ini.

Terkait tentang..., ini PNBPNya, ini sebetulnya target PNBPNya yang Pak Menteri sampaikan tadi, sudah pasti akan meningkat, pasti meningkat karena memang potensi *loss* dari temuan-temuan ini sudah kelihatan. Misalnya, PNBPNya layanan konatritan fidusia BHP kurang diterima di kas negara 2,5 miliar.

Nah, persoalannya ada potensi PNBPNya transaksi pendaftaran dan perubahan... (*suara tidak jelas 45:26*) dilakukan oleh lembaga OJK yang terdaftar pada Ditjen AHU, tapi belum bisa direalisasikan 307 miliar. Artinya, kan, PNBPNya ini banyak *loss*, *gitu loh*. Padahal, ini luar biasa.

Memang, kalau lihat dari tadi, pendapatan PNBPNya dari..., apa..., Kementerian Kumham ini sudah melebihi dari semua target, bahkan ada yang 200 persen lebihnya. Tapi, ini malah..., harusnya bisa lebih dioptimalkan *loh*.

Di imigrasi misalnya, ada beberapa kebijakan pemerintah ternyata yang cukup juga merugikan. Potensi kehilangan PNBPNya sebesar 3 triliun per tahun, jika kebijakan bebas visa kunjungan diterapkan kembali. Artinya, memang harus dikaji. Tiga triliun, Pak Menteri. Ini luar biasa. Jadi, memang potensi kas negara yang bisa kita dapatkan dari setiap kebijakan pemerintah ini memang harus benar-benar dilihat.

Nah, ini saya minta penjelasan Pak Menteri. Saya mulai dari sini dulu karena memang anggaran pasti, kami Partai PKB pasti setuju untuk meningkatkan anggaran Kumham, apalagi tadi penambahannya pun tidak terlalu besar.

Dirjen..., ini terkait paten merek dan hak cipta. Ini juga ada *loss*, walaupun tidak besar, 14 miliar. Tapi, bukan itu yang saya lihat itu di sini, *gini*. Potensi PNBPNya atas layanan KI mulai pendaftaran sampai pengeliharaan tahunan belum dapat direalisasikan sebesar 2,35 triliun. Hal tersebut disebabkan, antara lain, sistem aplikasi pelayanan KI belum memiliki fitur-fitur

yang dibutuhkan oleh penggunaan Dirjen KI. Artinya apa, 2,3 triliun. Itu loh. Masa *cuman* gara-gara aplikasinya tidak bisa di sini, ini apa maksudnya?

KETUA RAPAT (IR. PANGERAN KHAIRUL SHALEH, M.M.):

Kami ingatkan waktu sudah tujuh menit.

F-PKB (H. MOH. RANO AL FATH, S.H., M.H.):

Iya, ini kan pembahasannya waktunya juga tidak terlalu inilah. Jadi, menurut saya, Pak Menteri, saya terus terang terima kasih sama Pak Menteri bahwa pendapatan negara ini sudah naik jauh dari apa yang ditargetkan. Tetapi, masih banyak yang *lost* atas itu juga dan ini mohon kiranya menjadi tindak lanjut dari Pak Menteri.

Terkait anggaran yang diminta, menurut saya itu masih suatu kewajaran, misalnya di Dirjen Imigrasi, Dirjen Pas tadi saya lihat, ya, apalagi dirjen imigrasi, sekarang lagi mulai bagus-bagusnya untuk terkait imigrasi dan ini mudah-mudahan terus meningkatkan PNBP-nya.

Terhadap kawan-kawan BNPT, nanti gantian mungkin Mas Heru yang bisa memperdalamnya, nanti kalau ada kesempatan yang lain.

Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih.

*Wallahul muaffiq ila aqwamin tariq,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

KETUA RAPAT (IR. PANGERAN KHAIRUL SHALEH, M.M.):

Baik, selanjutnya kami persilakan dari fraksi Gerindra.

Pak Muhajirin, silakan.

F-P. GERINDRA (H. RAHMAT MUHAJIRIN, S.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

**Ketua, Wakil Ketua, serta
Bapak-Ibu Anggota Komisi III yang saya hormati,
Pak Menteri dan Kepala BNPT, serta jajaran yang kami muliakan,**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Terima kasih paparannya, Pak Menteri, Kepala BNPT, hasil penyerapan anggaran 2022 sudah cukup jelas. Kemudian, tadi juga dijelaskan hasil pemeriksaan sementara juga sudah ditindaklanjuti. Kemudian, anggaran untuk 2024 juga saya sudah menangkap gambarannya dan tadi juga ada usulan tambahan anggaran. Mudah-mudahan nanti usulan tambahan anggaran nanti akan disetujui oleh Komisi III.

Kepada BNPT, saya masih belum melihat bahwa masing-masing Deputi ini alokasi anggaran ini berapa. Tapi, di sini dijelaskan hanya belanja pegawai sekian, belanja barang sekian, belanja modal sekian. Tapi, kalau di Menteri Kumham itu ada rinciannya. Karena di sini..., apa namanya..., saya juga belum bisa melihat alokasi anggaran untuk pencegahan..., pencegahan, perlindungan, dan dere..., deradikalisasi ini..., ini adanya di deputi-deputi mana ini? Kita juga belum melihat ini. Artinya, yang menangani pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi ini di..., di struktur yang mana, seperti itu.

Kemudian, kepada Pak Menteri, kalau kita lihat anggaran APBN di 2022, semangatnya kan untuk perlindungan Covid atau pencegahan Covid serta pemulihan ekonomi ini. Ya, *alhamdulillah* bahwa 2022 kemarin, apa yang diharapkan dari semangat anggaran APBN tersebut bisa terlaksana dengan baik. Kemudian, di 2024, kita akan semangat anggarannya itu mempercepat transformasi ekonomi yang selektif dan berkelanjutan, begitu, Pak Menteri ya.

Nah, cuman, Pak Menteri, kalau kita melihat yang lalu-lalu ya, kalau peran dari Kementerian Hukum dan HAM ini di mana pembinaan hukum ya..., apa namanya..., terhadap keberlangsungan kehidupan penyelenggara negara di Indonesia ini, Pak, ini sampai hari ini kita masih belum melihat hal yang signifikan yang bisa mendongkrak ekonomi kita, Pak.

Saya ambil contoh aja, Pak, mohon maaf, yang jelas saja. Kebijakan hari ini, Pak, sumber daya alam yang tidak terbarukan itu dibuka seluas-seluasnya, Pak. Contohnya, tambang dan lain sebagainya. Tapi, yang baru terbarukan, contohnya, ikan atau sumber daya laut, ini sampai hari ini masih belum signifikan sumbernya terhadap ekonomi negara, Pak, dan kita lihat di sana banyak sekali peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih sehingga bingung. Sampai investor hari ini, Pak, mau menangkap ikan juga itu enggak berani karena tidak ada kepastian hukum.

Nah, ini kami mohon bantuan Pak Menteri sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang pembinaan hukum, Pak, ini bisa koordinasi dengan kementerian KKP dan kementerian terkait, Pak, agar supaya sumber daya alam kita yang baru terbarukan ini bisa digali secara maksimal untuk menyumbang APBN ke negara kita. Kita sudah beberapa tahun, Pak, kalau enggak salah hampir lima tahun ini, Pak, moratorium untuk menangkap ikan

ini, Pak, karena tumpang tindihnya hukum atau ragu-ragu untuk menentukan kebijakan, itu yang pertama.

Yang kedua, Pak Menteri, kalau kita bicara soal pembangunan nasional ya, ini kita tidak lepas dari yang namanya tanah, ya. Kemudian juga tidak lepas dari yang namanya rencana tata ruang, tidak lepas juga ketersediaan pangan atau ketahanan pangan.

Ini tanah, Pak, sampai hari ini juga, Pak, dari Sabang sampai Merauke, ini *buanyak* sekali permasalahan-permasalahan soal tanah, sama, Pak, Pak Menteri, masalahnya tumpang tindihnya hukum.

Sekali lagi, Pak, kami mohon bantuan Pak Menteri agar supaya permasalahan-permasalahan yang efek positifnya itu ke ekonomi ya, termaduk masalah tanah dan sebagainya ini, ini mohon dirapihkan penataan perundang-undangnya, Pak. Karena kita lihat saja, Pak, salah satu contoh saja, mungkin Pak Menteri juga dengar itu, Pak. Di Surabaya ini, Pak, ya, namanya Surat Hijau, itu jumlahnya 40 ribu peta bidang lebih, Pak.

Kemudian, kalau Pak Menteri juga lihat, potensi, potensi dari efek ekonomi atau multiplier dari Surat Hijau ini juga, ini banyak juga, Pak, hari ini kalau diperhatikan negatifnya. Tapi, kalau diurus, *insyaallah* juga banyak positifnya, Pak, karena kita tahu bahwa tanah ini punya nilai strategis terhadap nilai ekonomi. Kalau kita lihat hari ini, Pak, 40 ribu peta bidang, namanya iuran-iuran itu, iuran izin pemakaian tanah dan sebagainya, ini juga enggak jelas juga, Pak, 40 ribu peta bidang itu.

KETUA RAPAT (IR. PANGERAN KHAIRUL SHALEH, M.M.):

Pak Muja..., Pak Muhajirin, kami ingatkan, kita fokus anggaran dulu. Nanti dari pengawasan itu.

F-P. GERINDRA (H. RAHMAT MUHAJIRIN, S.H.):

Iya. Sementara dari saya, itu, Pak Menteri. Jadi, mohon maaf, kami mohon bantuannya, untuk anggaran memang betul-betul diperhatikan untuk pos-pos yang efeknya kepada pembinaan hukum atau kepastian hukum yang berlaku di Indonesia ini, terutama soal tadi itu, sumber daya alam, kemudian soal tanah.

Terima kasih, Pimpinan, dari saya ini, saya akhiri.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (IR. PANGERAN KHAIRUL SHALEH, M.M.):

Fraksi Partai Golkar, silakan.

F-P. GOLKAR (H. RUDY MAS' UD, S.E., M.E.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi menjelang siang,
Salam sehat semua,

**Pimpinan dan Anggota Komisi III yang kami banggakan,
Pak Menteri beserta dengan seluruh jajaran,
Pak Jenderal BNPT, beserta dengan seluruh jajaran.**

Hari ini memang fokusnya berkaitan dengan anggaran, tentu kami akan bicarakan tentang berkaitan dengan anggaran. Pertama, buat Kemenkumham, ya, selamat Pak atas pencapaiannya, prestasi di tahun 2022 sangat membanggakan ya. Kinerja kerja anggaran nomor dua terbaik di seluruh kementerian dan lembaga dan tentunya 15 kali WTP berturut-turut suatu prestasi yang patut kami banggakan, Pak Menteri. Tetapi, di balik ini semua, Pak Menteri, ada beberapa catatan saya.

Pertama, tentunya adalah berkaitan dengan temuan BPK dan ini saya rasa sangat realistis temuan ini dengan yang ada di lapangan, *make sense* banget, berkaitan dengan dirjen imigrasi bahwa negara berpotensi kehilangan PNBPN dari penerapan kembali bebas visa kunjungan atas negara dan tidak memiliki atas timbal balik, kurang lebih sekitar 3,02 triliun. Saya mengalami hal ini, Pak Menteri, pada saat saya melaksanakan kunjungan ke Shanghai.

Pertama, ke Shanghai, kita kalau untuk mengurus visa, itu waktu yang normalnya adalah lima hari kerja. Tentu banyak *opportunity-opportunity* yang hilang untuk bangsa Republik Indonesia ini berkaitan dengan seluruh aspek, apakah itu aspek bisnis dan sebagainya. Banyak sekali karena hari ini Cina adalah ekonomi terkuat di dunia.

Yang menjadi persoalan adalah kita harus bagaimana bisa menciptakan pendapatan negara ini tidak hanya di sektor berkaitan imigrasi saja, tetapi bagaimana mendapatkan potensi ekonomi buat NKRI ini. Saya melihat kunjungan pada saat ke Shanghai itu kita perlu waktu satu minggu, sementara mereka masuk ke Indonesia itu *free*.

Tentu perlu hubungan diplomatik, politik, lobi-lobi politik tingkat dewa mestinya ini agar ini *balance*, agar seimbang. Mereka masuk *free*, harusnya kita pun juga *free*. Karena kenapa? Jumlah penduduk Cina yang datang ke

Indonesia ini luar biasa banyaknya. Sementara di Indonesia terbatas dan potensi untuk kehilangan PNBPN kita, sudah disebutkan dengan BPK di sini adalah lebih daripada 3 triliun. Itu hanya baru proyeksi saja.

Yang kedua, yang menjadi persoalan adalah efek daripada BUMN-BUMN kita. Cina itu tidak akan datang ke Indonesia kalo menggunakan pesawat Garuda. Dia pasti menggunakan pesawat mereka. Yang repotnya lagi, mereka belanja pun tidak akan menggunakan duit kita. Dia menggunakan WeChat. Sementara kita, orang Indonesia yang mau datang ke Shanghai atau ke China itu terbatas dan perlu dibatasi dengan visa, *riweuhnya*, dan sebagainya, dan sebagainya.

Yang menjadi persoalan, pada saat saya pulang saya turun, mau ke Shanghai harus transit Singapura, Singapura baru ke Shanghai. Sementara kita di Indonesia, mau pulang ke sini, penumpangnya cuma 40 orang dengan *triple seven*. *Gimana* nggak bangkrut Garuda kita itu? Karena kenapa? kesusahan di dalam mendapatkan lobi-lobi berkaitan dengan bebas visa.

Nah, ini perlu menjadi catatan maka ini menjadi temuan BPK di sini. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa temuan BPK ini sangat *makes sense*. Ini yang menjadi persoalan kita. Ini tentu menjadi catatan agar kita pun juga demikian.

Artinya, asas keseimbangannya ini harus sama. Kalau kita di sana *free...*, mereka *free*, harusnya kita pun juga demikian, *free*. Ini baru hubungan bilateral yang sangat simbiosis mutualisme, sama-sama saling menguntungkan. Kalau sekarang ini tidak menguntungkan. Ini tentu menjadi catatan ini. Ini sesuai dengan temuan BPK juga.

Yang kedua adalah berkaitan dengan pembahasan anggaran, berkaitan dengan dirjen kekayaan intelektual. Pembahasan anggaran ini tentunya untuk bisa memberikan dampak..., dampak bagi masyarakat kita ini, khususnya yang memiliki HAKI ini. Karena kenapa? catatan terkait PNBPN ini di sini juga ditemukan di sini oleh temuan BPK bahwa potensi PNBPN kita ini kurang lebih sekitar 123,38 miliar dari hak paten ini.

Ini juga tentu saya melihat tentunya berkaitan dengan kekayaan intelektual perlu diperbaiki lagi. Karena kenapa, kerjasama antara eksternal, baik internasional maupun nasional ini belum mampu, saya lihat ini memberikan dampak yang positif. *Nah*, tentu saya perlu dijelaskan nanti ini bagaimana gambaran ataupun kendala-kendala kita di lapangan, bagaimana sistem yang harus dibangun agar KI, Dirjen KI ini bisa mengoptimalkan PNBPN kita. Jadi, ini catatan saya berdasarkan juga temuan KPK, eh, BPK.

Dan buat BNPT sendiri, pertama, Pak Jenderal, sukses *nih*, Pak, di sini WTP 10 kali berturut-turut, mudah-mudahan ini menjadi acuan di dalam

program kerja teman-teman di BNPT ini. Baik Kemenkumham maupun BNPT saya mewakili Partai Golkar sangat mendukung program-program anggaran ini agar menyusun program kerja kita di tahun 2024 nanti ini semuanya bisa *achievement*. Berapa pun yang dibutuhkan untuk bangsa dan negara ini, Partai Golkar siap untuk memberikan *supporting* itu.

Adapun sedikit catatan saya buat BNPT ini, saya perlu mendapatkan bagaimana program-program dan kesiapan-kesiapannya berkaitan dengan pencegahan, mengingat tahun 2024 ini kita akan memasuki tahun politik. Saya perlu sekali jangan sampai nanti ada kelompok-kelompok terorisme ini yang bisa menjadikan memecah bela di dalam kegiatan-kegiatan pesta demokrasi yang sudah di depan mata yang harus kita *hadapin*. Ini tidak bisa *dihindarin*, tetapi harus *dihadapin*. Saya perlu program-program itu, Pak Kepala BNPT, berkaitan serta pengaruh-pengaruhnya potensi radikalismenya nanti yang akan terjadi pada saat nanti kegiatan 2024.

Akhirul kalam,

Wallahul ila aqwamith thariq,

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (IR. PANGERAN KHAIRUL SHALEH, M.M.):

Silakan, Fraksi Nasdem.

F-P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.HUM., LL.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi III,
Kepala BNPT beserta seluruh jajaran,
Pak Menteri Kumham beserta seluruh jajaran.**

Yang pertama, saya ke BNPT dulu ya. Tentunya kami dari fraksi Nasdem mendukung dukungan penambahan anggaran yang diajukan ini karena memang kita ketahui bersama bahwa saat ini kita juga sedang menghadapi tahun politik ya. Tentunya banyak hal-hal yang ada peningkatan kerawanan di situ sehingga harus ada satu kerja-kerja yang lebih optimal lagi yang bisa dilakukan oleh BNPT.

Saya memberikan beberapa catatan. Yang pertama-tama, terkait dengan program koordinasi peran serta masyarakat dan pemerintah dalam pencegahan terorisme, yang menurut saya justru ini harus menjadi focus ya, ketika nanti ada penambahan anggaran, bahkan kalau perlu ditambahkan lagi anggarannya, kenapa? Karena begini, terkait dengan tahun pemilu dan apa yang terjadi belakangan ini, ada satu peningkatan intoleransi di tengah-tengah masyarakat, seperti, misalnya penghalang-halangan hak untuk menjalankan

ibadah. Yang kalau kemudian ini dibiarkan tentu akan berpotensi untuk meningkatkan ekstremisme di tengah-tengah masyarakat.

Oleh karena itu, maka saya berharap ada program khusus, dengan anggaran khusus untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penghormatan terhadap hak untuk menjalankan ibadah. Mungkin bisa ditelusuri beberapa kasus yang terjadi saat ini, apa pemicunya, apa penyebabnya, akar masalahnya apa, dan kemudian langkah apa yang bisa dilakukan juga oleh BNPT untuk melakukan program-program tertentu karena ini cukup memprihatinkan terkait dengan intoleransi yang makin meningkat ya, di tengah-tengah masyarakat.

Yang berikutnya, kalau kita lihat sebaran anggaran yang diajukan, ini kan untuk deradikalisasi dalam lapas ini cukup besar ya, 18 M, eh..., 18..., ya, 18 ya. Untuk program deradikalisasi dalam lapas ini kan sebenarnya beririsan juga dengan Ditjen Lapas. Barangkali juga bisa diadakan satu diskusi bersama untuk mengoptimalkan anggaran yang ada. Jadi, anggaran ini sudah ada, bagaimana caranya kemudian bisa lebih optimal dengan juga melihat apa kebutuhan dari Ditjen Lapas, apa yang sudah dijalankan oleh Ditjen Lapas juga sehingga saling mengisi ya, supaya tidak jalan sendiri-sendiri.

Nah, menurut saya, ini bisa dilakukan untuk mengoptimalkan anggaran yang ada dan harapannya dengan anggaran yang optimal ini barangkali juga bisa dialokasikan untuk yang pencegahan di tengah-tengah masyarakat itu tadi, ini arahnya ke sana. Jadi, kalau kita bisa efisien di..., deradikalisasi dalam lapas mungkin bisa dialokasikan untuk yang lain, utamanya adalah untuk pencegahan ekstremisme di tengah-tengah masyarakat. Itu untuk BNPT.

Nah, sekarang untuk Kemenkumham. Pertama, saya memberikan apresiasi kepada Kemenkumham terkait dengan anggaran ini karena beberapa waktu yang lalu dan seringkali setiap rapat anggaran saya selalu sampaikan ini. Terkait dengan anggaran untuk Ditjen HAM ya, karena beberapa kali juga saya sampaikan bahwa dari namanya saja, HAM itu adalah setengahnya dari Kemenkumham, yang selama ini anggarannya paling kecil, meskipun ini juga paling kecil juga ya, tetapi ada peningkatan.

Kalau di tahun 2023 yang kemarin kan 18M ya. Sekarang meningkat menjadi 21M. Ini saya memberikan apresiasi. Terima kasih atas perhatiannya terhadap Ditjen HAM ini, meskipun juga tidak ada usul penambahan anggaran.

Nah, kalau boleh, mungkin bisa dipertimbangkan ya, tambah lagilah penambahan anggaran untuk Ditjen HAM ini supaya perhatian kita terhadap kemajuan HAM itu juga bisa menjadi fokus utama di Kementerian Hukum dan HAM.

Yang berikutnya, terkait dengan program strategis ya. Di sini ada pergeseran juga dari dukungan manajemen ke regulasi. Saya juga memberikan apresiasi ini sangat bagus karena memang ada kebutuhan untuk itu karena saya ikuti terus apa saja yang dilakukan oleh Kemenkumham dan ketika memang kebutuhannya justru bisa digeser ke kebutuhan regulasi itu sangat dibutuhkan.

Apalagi, *nah*, apalagi saat ini kita sedang melakukan sosialisasi KUHP baru. *Nah*, kalau perlu, fokus utama dari seluruh persoalan regulasi ini ada di sosialisasi KUHP baru. Saya sempat ikut di sosialisasi, di Lampung, kemarin, yang saya pikir masih sangat kurang karena waktunya terbatas, pesertanya terbatas, padahal kebutuhan untuk kita lebih meluaskan lagi itu sangat tinggi. Oleh karena itu, anggaran untuk sosialisasi KUHP baru menurut saya penting untuk ditingkatkan.

Dan yang terakhir, terkait juga dengan program pemajuan dan penegangan HAM, ada tujuh kegiatan di sini, ada implementasi instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi. Saya pikir juga bisa dioptimalkan lagi, juga bisa melibatkan berbagai pihak agar ini bisa berjalan dengan baik. Tentunya dengan harapan itu tadi, mudah-mudahan tetap masih ada alokasi tambahan lagi *nih*, untuk Ditjen HAM karena memang kita juga tetap harus memprioritaskan juga tugas Kemenkumham terkait dengan hak asasi manusia.

Demikian, terima kasih, Pimpinan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (IR. PANGERAN KHAIRUL SHALEH, M.M.):

Selanjutnya fraksi Demokrat.

F-P. DEMOKRAT (H. AGUNG BUDI SANTOSO, S.H., M.H.):

Baik, terima kasih.

**Pimpinan yang kami hormati,
Sahabat-sahabat Komisi III,
Pak Menteri,
Kepala BNPT yang kami hormati,**

Alhamdulillah kita dapat melakukan kembali kegiatan rapat dan saya ingin memberikan beberapa masukan. Yang pertama adalah untuk Menkumham. Yang pertama adalah melihat pos..., melihat postur anggaran 2024.

Itu ada program untuk pemajuan dan penegakan HAM. Ini mendapat postur anggaran yang paling sedikit, hanya 21 miliar sekian dan tentunya kami berharap dengan anggaran itu dapat digunakan untuk program peningkatan penegakan HAM, misalnya untuk membentuk Desa Sadar HAM, maupun untuk mengiringi program sadar hukum. Dan, kemudian, kita lihat bahwa lapas-lapas di daerah ini juga sudah hampir ya, mungkin bisa dikatakan hampir, semuanya *over capacity*. Jadi, untuk itu perlu anggaran..., peningkatan anggaran untuk perbaikan lapas dan pemenuhan hak narapidana karena bagaimanapun juga walaupun mereka menjadi orang yang sebagian dicabut haknya, tentunya juga perlu diperhatikan hak-hak lainnya.

Dan, yang terakhir, terkait dengan temuan pengolahan aset di Nusa Kambangan, Pak Menteri, yang tidak sesuai kondisi. Kita mohon penjelasan, mengapa hal tersebut bisa terjadi.

Kemudian untuk BNPT, kami dari fraksi Partai Demokrat mendukung tambahan untuk BNPT karena memang situasi 2023 ini sudah mulai... sudah mulai menghangat. Jangan sampai nanti situasi ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang ingin mengganggu atau ingin mengacaukan jalannya..., jalannya pemerintahan maupun jalannya terhadap situasi untuk pergantian atau pergantian dari kepemimpinan negara ini. Ini tentunya perlu dikawal dengan tepat karena bagi kami ini merupakan hal yang sangat penting.

Kemudian, kami melihat di sini ada penurunan anggaran untuk program dukungan manajemen, dihadapkan dapat dioptimalkan untuk pengembangan SDM BNPT, terutama pengembangan SDM di kantor perwakilan BNPT di daerah.

Dan, yang terakhir, Pak, ini terkait dengan bagaimana *monitoring* daripada BNPT sendiri terhadap aksi ya, penyebaran terorisme yang dilakukan melalui media sosial dan tentunya bagaimana cara pencegahannya karena ini kan kita..., media sosial ini menjadi media yang sangat cepat ya, menyebar sehingga kalau tidak ada cara-cara yang efektif, tentunya ini juga membuat satu persoalan itu sendiri, suatu kerepotan daripada untuk pencegahannya.

Saya kira itu dari kami, terima kasih.

KETUA RAPAT (IR. PANGERAN KHAIRUL SHALEH, M.M.):

Fraksi PKS, baru Mas Dede ya.

Silakan Fraksi PKS.

F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.SI.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ketua Rapat, Bapak-Ibu Anggota Komisi III yang kami hormati, Menteri Hukum dan HAM beserta Wakil Menteri Hukum dan HAM, dan juga Sekjen Kementerian Hukum dan HAM, yang baru-baru ini ditunjuk menjadi Pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Mudah-mudahan Pak Andap bisa membagi pikiran dan tenaga antara Sulawesi dan Jakarta, Dan juga kepada Kepala BNPT Pak Rycko beserta Sestama dan jajaran pejabat utama di lingkungan BNPT yang kami hormati, dan juga para Ditjen di Kementerian Hukum dan HAM yang berhadir.

Dalam kesempatan ini fraksi PKS tentu ingin menyampaikan selamat atas keberhasilan meraih wajar tanpa pengecualian terkait dengan pelaksanaan anggaran di Kementerian Hukum dan HAM dan juga di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Begitu pun memang kami membaca dari hasil pemeriksaan semester Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan bahwa masih ada temuan-temuan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan temuan-temuan yang ditemukan oleh BPK juga signifikan, tidak boleh dianggap remeh dalam pandangan kami.

Saya membaca ada 34 temuan yang ditemukan oleh BPK di Menkumham RI. Satu di antaranya soal pertambangan kapur di Nusa Kambangan dan lain sebagainya, begitu juga BNPT.

Harapan kami kepada Kementerian Hukum dan HAM dan BNPT mudah-mudahan temuan-temuan yang ditemukan oleh BPK pada HAPSEM 2022 itu tidak ditemukan lagi pada 2023. Itu harapan kami sebab ada juga sebahagian kolega kami di sini bertanya, temuan banyak, tapi juga bisa mendapatkan WTP. Tapi, saya katakan bahwa memang tidak mudah mengelola uang yang begitu banyak sehingga meskipun sudah berusaha untuk patuh, tetap saja kemudian ada temuan-temuan yang ditemukan oleh BPK.

Oleh karena itu, kami Fraksi PKS mengharapkan agar ke depan temuan-temuan ini idealnya tidak ditemukan oleh BPK, idealnya. Tapi, memang kami meyakini tidak mudah untuk mengelola anggaran. Apalagi kalau kemudian BPK punya *frame*, punya kaca mata sendiri dalam mengevaluasi atau menilai laporan keuangan yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga.

Adapun terkait dengan realisasi anggaran tahun 2022, kami melihat di sini sudah cukup baik dan realisasinya juga hampir mendekati 100%. Adapun anggaran untuk 2024 yang akan datang, kepada Kementerian Hukum dan HAM kami menitipkan harapan. Menitipkan harapan terkait dengan tugas-

tugas dan fungsi yang selama ini diemban oleh Kementerian Hukum dan HAM. Tentu saja waktu tidak begitu banyak untuk kita sampaikan di sini karena kalau melihat jadwal kita akan berakhir barangkali pada pukul 12. Padahal, banyak hal yang harus kita bicarakan menjelang 2024 yang akan datang.

Oleh karena itu, di tengah keterbatasan waktu ini saya ingin menitikkan beberapa hal. Kami berharap agar alokasi anggaran untuk Desa Sadar Hukum itu seharusnya menjadi perhatian pemerintah sebab Desa Sadar Hukum dalam pandangan kami itu menunjukkan ruh kita sebagai negara hukum. Jadi, kalau kemudian alokasi anggaran desa sadar hukum masih tertatih-tatih, kemudian masih terbatas, itu menunjukkan bahwa upaya untuk mewujudkan negara hukum ya, seperti 'pungguk merindukan bulan'.

Nah, karena itu, harapan kami, Fraksi PKS, kepada Kementerian Hukum dan HAM, Desa Sadar Hukum dalam pandangan kami ini sangat-sangat vital. Berbagai macam program kementerian dan lembaga, kalau kesadaran hukum masyarakat di level desa itu tidak ada maka sulit untuk kita katakan berhasil. Kepolisian, misalnya, ada Program Desa Bebas Korupsi. Kemudian, BNN ada Program Desa Bersinar dan banyak kementerian dan lembaga lainnya yang juga punya program di level desa. Tapi, kalau kemudian kesadaran hukum masyarakat di level desa itu masih rendah, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa program-program itu bisa kita lakukan.

Bahkan dalam politik pun, Pak Menteri, kalau desa sadar hukum ini berhasil kita lakukan dan pemerintah punya niat untuk merealisasikan dengan angka yang besar maka politik transaksional juga akan bisa kita minimalisir, politik berbiaya tinggi juga bisa kita minimalisir karena masyarakatnya punya kesadaran hukum dan mereka paham untuk apa mereka ikut dalam pemilu, dalam pileg, maupun dalam pilihan presiden. Tapi, karena, sekali lagi saya katakan bahwa Desa Sadar Hukum ini belum sesuai yang kita harapkan sehingga kita lihat masih banyak terjadi hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita inginkan. Apalagi kalau kita lihat peredaran gelap narkoba di level desa yang sudah sangat mengkhawatirkan.

Nah, karena itu kami menitikkan harapan kepada kementerian hukum dan HAM. Ya, mudah-mudahan ya, meskipun di tengah anggaran yang tidak memadai, alokasi anggaran untuk Desa Sadar Hukum ini bisa diwujudkan. Jadi, saya ingin katakan bahwa berbagai macam kegiatan kementerian dan lembaga yang diarahkan ke masyarakat desa tanpa diikuti kesadaran hukum masyarakat maka saya mengatakan ini agak sulit untuk kita realisasikan. Jadi, kesadaran hukum masyarakat yang baik dalam pandangan kami adalah mereka bisa melakukan tindakan-tindakan *pre-emptive* dan *preventive* terkait dengan berbagai macam hal-hal yang menjurus kepada tindak pidana.

Nah, ini harapan kami kepada kementerian hukum dan HAM, mudah-mudahan ini bisa diwujudkan, meskipun memang kita memasuki tahun politik, Pak Menteri, apalagi jadi caleg, ya kan, jadi ini juga kadang-kadang seperti apa, kita juga jadi caleg, ya kan. Jadi, memang ini tugas partai, Pak, kita ini kan petugas partai. Jadi, kita harus menjalankan perintah partai, kita juga harus mampu bagaimana partai juga bisa bertahan. Kita semua ini sama *nih*, Pak Menteri, jadi caleg semuanya.

Cuma, ngeri-ngerinya sedap terpilih atau tidak ya, kita lihat nantilah. Pokoknya caleg dulu, Pak. Memang ada caleg jadi, ada jadi caleg. Kalau Pak Menteri biasanya caleg jadi *nih*, ya kan. Kalau kami jadi caleg, Pak.

Kemudian, yang kedua, soal bantuan hukum, Pak Menteri. Mungkin Pak Menteri ingat, pada periode 2004-2009 kita di sini, Pak, jadi DPR bagaimana undang-undang ini kita buat ya. Pak Menteri bersama saya dan sejumlah teman, ya, waktu itu ada Pak Patrialis Akbar juga. Bagaimana kita ingin kemudian agar bantuan hukum ini bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Jadi, karena kesadaran hukum masyarakat masih rendah, akhirnya mereka ya, akhirnya mereka tadi itu, mereka melanggar hukum. Lalu, kita menggelontorkan uang untuk melakukan bantuan hukum.

Nah, karenanya, berkait dengan bantuan hukum, kami juga mengharapkan dan menitipkan harapan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk bisa memaksimalkan sehingga kemudian apa yang diharapkan oleh negara, apa yang diharapkan oleh pemerintah itu bisa kita wujudkan.

Demikian untuk Kementerian Hukum dan HAM. Kami bisa memahami dan bisa menerima kalau kemudian ada anggaran atau tambahan anggaran yang diajukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam rencana anggaran tahun 2024 dan mudah-mudahan sejumlah temuan-temuan yang ditemukan oleh BPK, tadi kami membaca sudah diselesaikan dan juga mudah-mudahan tidak ditemukan pada tahun 2023 ini.

Kepada BNPT, sekali lagi karena kami melihat bahwa ada sejumlah kebutuhan dan tambahan anggaran yang sudah disampaikan di sini, kami bisa menerima, Pak Rycko. Mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh BNPT dan anggaran yang dialokasikan untuk rencana itu bisa dilakukan dan kami juga menitip harapan agar forum-forum yang dibentuk di provinsi terkait dengan penanggulangan terorisme itu bisa dimaksimalkan, meskipun anggarannya memang..., apa namanya..., *limited* atau terbatas.

Barangkali demikian, Ketua, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami bisa menerima apa yang disampaikan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan BNPT. Kami juga bisa menerima usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh dua mitra kerja yang ikut rapat kita pada pagi hari ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (IR. PANGERAN KHAIRUL SHALEH, M.M.):

Dede, silakan singkat ya.

F-PDIP (DEDE INDRA PERMANA, S.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Singkat. Ada tiga poin yang ingin saya sampaikan.

Yang saya hormati Kepala BNPT dan Menteri Kemenkumham yang saya hormati,

Saya mengapresiasi apa yang menjadi programnya Kemenkumham, yang diluncurkan oleh Dirjen Imigrasi, Golden Visa, yang tentunya untuk peningkatan PNBPN ya, Pak. Nanti mohon dipaparkan secara singkat. Dan, masukan untuk Haki, untuk sistemnya lebih transparan supaya kita bisa memantau hari per hari, mungkin dengan cara atau *workflow*-nya, akses permohonannya kita bisa memantau.

Lalu, proses pendaftaran merek juga supaya bisa dipercepat, mungkin dengan cara publikasi dibuat satu bulan saja. Ada beberapa masukan, aspirasi kami setelah reses kemarin, dari Pekalongan, kebetulan dapil saya, bahwa PT Prisma Abadijaya, pemilik sarung Gajah Duduk, di tahun 2018 sudah melalui proses jual-beli, Pak. Tapi, tanggal 27 Juli 2021 secara sepihak Direktur Merek melakukan penarikan. Mohon Pak Menteri dibantu proses ini bisa berjalan dengan baik.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (IR. PANGERAN KHAIRUL SHALEH, M.M.):

Waktu kita tinggal 30 menit lagi. Sesuai kesepakatan....

F-P. GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Baik.

KETUA RAPAT (IR. PANGERAN KHAIRUL SHALEH, M.M.):

Singkat ya, Pak Supri, silakan.

F-P. GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Yang saya hormati Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi III,
Yang saya hormati Pak Menteri Hukum dan HAM,
Pak Wakil Menteri, Pak Sekjen, dan seluruh Dirjen yang sempat hadir
dan jajaran,
Pak Dirjen Imigrasi,
Yang saya hormati Pak Kepala BNPT dengan seluruh jajaran.**

Saya coba-coba untuk mempersingkat bahwa pada pembahasan hari ini karena kita membahas soal anggaran maka saya coba fokus soal anggarannya dengan beberapa poin, sedikit tambahan terkait dengan hal yang mendesak. Pertama, anggaran yang telah diminta oleh Kementerian Hukum dan HAM ada usulan tambahan pada tahun 2024 ini sebesar R2,2 triliun. Kemudian, pagu indikatif 2024 R18 triliun.

Setelah kami mencoba mempelajari semua ini, Pak Menteri, pertama, saya mau sampaikan tidak ada keraguan bagi kami untuk menyetujui permintaan usulan tambahan 2024 ini sebesar R2,2 triliun. Itu Golkar, Pak. Berarti Golkar sangat mendukung dengan segala program yang telah direncanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dan, ada pun harapan, pertama, harapan kita karena ini menyangkut masalah penggunaan keuangan negara maka tentu hasil temuan BPK ini yang menjadi salah satu bentuk yang harus diatensi sebaik mungkin.

Terutama, saya melihat dari hasil temuan ini, ada di poin dua, menyangkut masalah PNBP dari layanan kenotariatan, fidusia, dan balai harta peninggalan atau BHP kurang diterima di kas negara sebesar R2,56 miliar dan terdapat potensi ini, ini baru potensi, PNBP atas transaksi pendaftaran dan perubahan fidusia yang dilaporkan oleh Lembaga Pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan, namun belum terdaftar pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang belum dapat direalisasikan sebesar R307,46 miliar. Maka ini, langsung teringat saya soal kenotariatan ini.

Baru-baru ini, Pak Menteri, Pak Ketua, mesti saya sampaikan ini. Bahwa baru-baru ini sejumlah perwakilan kenotariatan datang ke tempat ini menyampaikan aspirasi dan baru-baru ini kabarnya kami mendengarkan pelaksanaan kongres kenotariatan itu karena ini sangat terkait tadi yang saya sampaikan, ada surat yang disampaikan oleh pengurus 25 perwil ini kepada Komisi III, tetapi juga ditembuskan kepada per anggota. Salah satu dalam isi suratnya ini menyampaikan bahwa pengurus 25 perwil ini tidak diundang hari dalam kongres, bahkan nama-namanya tidak masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT kongres.

Padahal, mereka adalah seharusnya pimpinan persidangan dalam kongres atau presidium kongres sehingga dari 33 Ketua Pengurus Wilayah

yang memimpin persidangan dalam Kongres kemarin, hanya 8 Ketua Perwil yang hadir dan suratnya ini ada sama kami. Tetapi, untuk lebih jelasnya supaya saya tidak berdosa menerima surat ini dan harus saya sampaikan kepada Bapak maka saya minta kepada Pak Ketua Sidang, Pimpinan Sidang supaya saya tidak lama menggunakan waktu untuk membacakan ini maka izinkan saya menyerahkan kepada Pak Menteri supaya mengikuti permintaannya Pak Ketua, jangan waktu lama dipakai.

KETUA RAPAT (IR. PANGERAN KHAIRUL SHALEH, M.M.):

Silakan, silakan.

(PENYERAHAN DOKUMEN)

Untuk sekarang ada yang ditanyakan, terakhir? Kalo gak ada, lewat.

F-P. GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Eh, sebentar, Ketua.
Ketua

KETUA RAPAT (IR. PANGERAN KHAIRUL SHALEH, M.M.):

Oh, masih ada lagi? Tadi bilanginya singkat.

F-P. GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Untuk Kementerian Hukum dan HAM sudah selesai karena Bapak meminta supaya tidak banyak waktu, selesai. Saya kira Kementerian Hukum dan HAM ini dengan seluruh jajarannya sangat bagus sekali. Ada sebenarnya harapan saya kepada keimigrasian kita. Pak ini sahabat saya yang baik hati, Direktur Imigrasi.

Pak, kalau kita masuk Singapura, misalnya, itu paspor kita begitu masuk, tidak lagi berhadapan orang, dikasih masuk, langsung terbuka pintunya kita ke luar. Kapan Indonesia bisa seperti itu? Saya kira ini bagus sekali, Pak Dirjen Imigrasi. Saya kira Pak Ketua juga biasa begitu, lewat begitu.

Kemudian, Kepala BNPT dan jajaran, saya menyambut baik, Pak, program prioritas yang Bapak sampaikan, di halaman 22. Di halaman 22 ini saya membaca dengan baik, pemberdayaan perempuan anak dan remaja, pembangunan desa siap siaga, desa damai, pembangunan sekolah damai, peningkatan asesmen pegawai dengan tugas risiko tinggi, re-edukasi terhadap keluarga napiter, kemudian pemberdayaan penyintas dan keluarga, usulan anggaran sebesar 46,4 miliar.

Kalau angka sekecil ini, Pak, meskipun ini bukan uang saya, ini uang negara. Tetapi, melihat programnya Bapak maka saya mengatakan *Bismillahirrahmanirrahim*, kami setuju, Pak.

Tidak mampu, Pak, kasihan kami kalau saya mau menawar-nawar lagi dengan angka yang kecil ini. Melihat dalam rangka penyelamatan nyawa anak bangsa kita, saya kira program Bapak ini segera direalisasikan ke bawah, supaya tidak ada lagi orang yang direkrut untuk menjadi bagian daripada pelaku-pelaku terorisme yang ada.

Dan, terakhir sekali, saya harap kepada BNPT supaya jangan lengah, karena biasanya kalau adem-adem seperti ini, Pak, biasanya tiba-tiba meledak lagi, ada letupan-letupan lagi. Saya kira di saat-saat adem seperti ini, sudah bisa kita mengantisipasinya.

Saya kira itu, terima kasih, Pak Ketua yang baik hati dan bijaksana. Saya kembalikan.

Wassalamu'alaikum warahmaullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (IR. PANGERAN KHAIRUL SHALEH, M.M.):

Pak Amir, ada yang mau disampaikan?

Silakan.

F-PPP (DR. HM AMIR USKARA, M.KES):

Terima kasih, Ketua.

**Pimpinan dan teman-teman Anggora Komisi III,
Pak Menteri,
Kepala BNPT dan seluruh jajarannya yang saya hormati,**

Karena hari ini kita bicara tentang anggaran, tentu kita bicara angka-angka saja. Saya, pertama, untuk Kemenkumham. Saya kira dengan pagu anggaran yang ada penambahan dari pagu indikatif 200 miliar dengan melihat program yang ada, saya kira tidak ada masalah buat PPP. Semua bisa dilaksanakan. Yang kita titip hanyalah bagaimana supaya anggaran tersebut betul-betul bisa dimanfaatkan secara maksimal, Pak Menteri, sehingga menjadi harapan kita terkait dengan fungsi anggaran ini betul-betul bisa direalisasi.

Sekalipun kalau kita lihat hasil temuan BPK, sebagai penerima PNBPN, pengelola PNBPN, ada potensi kehilangan PNBPN sebesar R3,02 triliun per tahun, jika bebas visa kunjungan diterapkan kembali. Tentu ini harus juga

menjadi perhatian karena ini adalah sebuah anggaran yang cukup besar, kalau itu sampai kita lakukan kembali. Sementara potensi penerimaan dan harapan yang kita dapatkan dengan memberikan bebas visa kepada beberapa negara ternyata tidak efektif atau kurang efektif seperti apa yang menjadi harapan kita.

Untuk PNBP, saya kira tidak ada masalah dengan pagu anggaran yang tersedia dan usulan tambahan, buat kami juga tidak ada persoalan. Mudah-mudahan ini, sekali lagi, bisa disetujui dan bisa mendapatkan persetujuan juga di tingkat Badan Anggaran.

Saya kira itu, Pak Ketua, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (IR. PANGERAN KHAIRUL SHALEH, M.M.):

Pak Menteri, ini koalisi Bapak, dari PPP ini, jadi langsung setuju.

Terakhir dari PKS, Pak Dimiyati.

F-PKS (DR. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI.) :

Ya, calon koalisi juga taunya, ya.

Gimana Pak Bambang Pacul aja deh.

**Yang saya hormati Pimpinan serta Anggota Komisi III,
Pak Menkumham, Pak Wamen,**

Pak Gubernur, Pak Gubernur, sini Pak Gubernur. Selamat ya, Pak, jadi gubernur, Pak.

Sudah cocoklah Pak Sekjen jadi gubernur..., Pj. Gubernur.

Berapa lama ya, hampir....

Bisa 2-3 tahun, Pak, jadi Pj. Gubernur, mengelola APBD.

**Yang saya hormati para Dirjen serta Pejabat Kementerian
Kemenkumham,
Yang saya hormati Kepala BNPT serta jajarannya.**

Saya hanya mengulas saja. Ini, anggaran ini terus nambah. Secara logika berpikir, *kok*, nambah terus ya, *gitu*. APBD..., apa anggaran satuan kerja itu terus meningkat. Padahal, kalau misalnya dibangun infrastruktur, misalnya kita perlu bangunan, *gitu*, kan, harusnya mengecil, *gitu* ya. Tapi,

kenyataannya ini meningkat. Berarti, banyak infrastruktur dan superstruktur yang belum dikerjakan maka harus punya rencana kerja jangka Panjang, Pak Menteri. Kumham ini terutama, yang lembaga yang besar ini.

Kementerian Kumham ini beda dengan kementerian-kementerian lain, di semua kabupaten kota punya anak buahnya, makanya kalau Pak Menteri *nyalon*, menang lagi, Pak. Anak buahnya banyak banget, belum yang isinya, *gitu*.

Maka, oleh sebab itu, Kementerian Kumham itu harus punya rencana kerja anggaran yang sifatnya *long term*. *Long term* itu berapa, *sih*, sebetulnya kalkulasi kebutuhan dana, misalnya 20 tahun ke depan, *gitu*, seperti apa sehingga bisa di..., di..., apa..., diprogramkan, dianggarkan, dan Kementerian Keuangan tidak boleh menolak, *gitu*.

Sudah jelas *term*-nya, tahun ini sekian, tahun ini sekian, tahun ini sekian. Tapi, saya lihat apa yang usulkan Pak Menkumham, usulannya hanya 24 triliun. Di acc sebesar 18,3. Ini baru pagu anggaran, Pak. Ditekan dikit lagi pagu alokasi bisa tembus, Pak, 24, tinggal..., Kementerian Kumham ini kan kewenangannya luar biasa dihilir. Siapa yang berani sama Menteri Kumham ini? Punya..., punya LP, punya rutan.

Oleh sebab itu, saya lihat usulan Bapak ini terlalu kecil ya untuk di..., di... apa, di-acc. Kalau usulan, ya, seperti BNPT itu usulan, dua kali lipat, Pak. Saya lihat, Pak, BNPT 886 miliar, yang di acc hanya 465.

Nah, maka dengan sendirinya program ini harus disentuh. Saya hanya nitik beratkan, Pak. Jadi, saya lihat program Bapak ini yang bersentuhan dengan masyarakat, libatkan kami, Pak. Jangan Bapak main sendiri *aja*, libatkan kami. Rasanya nggak pernah kami melakukan sosialisasi bersama. *Nah*, ini yang harus ada program-program yang kebersamaan.

Terus, juga banyak Bapak Dirjen-Dirjen yang menangani, misalnya Kenotariatan, terus juga Imigrasi, dan Ditjen-Ditjen lainnya, ya, harus lebih modern. Tapi, memang saya apresiasi, Pak, dalam pembuatan paspor, Pak, sekarang, hebat sekali. Secara elektronik. *Nah*, ini juga harus dilakukan terus.

Saya titip, Pak Menteri, di lapas atau rutan-rutan itu banyak rutan-rutan yang sudah tidak layak huni untuk warga binaan. *Nah*, ini tolong di segera dilakukan..., apa..., revitalisasi atau perbaikan, rehabilitasi atau pembangunan, atau kalau perlu dilakukan *ruislag*.

Salah satu contoh ini, Pak Menteri, di dapil saya itu di Pandeglang, itu ada rutan, sebelahnya masjid. Kalau Pak Menteri hibahkan ke masjid, itu pahalanya banyak, Pak Menteri, itu. Jadi, nanti rutannya dibangun di mana koordinasi dengan pemerintah daerah dan minta lahan yang lebih besar, Pak.

Kalau perlu dikasih pulau itu sama pemerintah daerah, banyak pulau di sana sehingga pembangunannya lebih layak dan lebih teratur, termasuk air bersihnya. *Nah*, kalau di situ air bersihnya persoalan, itu beberapa hal.

Terus, yang kedua, BNPT. Ini anggaran yang ideal itu 886 miliar, Pak.

Pak Rycko, ini bagus sekali, kalau saya lihat program-programnya bagus. Hanya tadi, terkait dengan..., apa..., pembinaan, termasuk pembinaan napiter, *nah*, itu juga libatkan kami yang ada di DPR sehingga kita bisa melakukan sosialisasi bersama dan *insyaallah*, Pak, nanti kepemimpinan Bapak ke depan ini bisa tembus, Pak, sampai lebih dari satu triliun. Kan, kepemimpinan senior-senior Bapak lebih hebat lagi, pada tembus semua, Pak.

Nah, itu yang kita harapkan bersama. Ya, sehingga kalau anggaran, ini kan *budget impact*, Pak. Anggaran besar Bapak bisa melakukan *output*. *Output* lebih bagus lagi.

Mungkin itu saja, Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT (IR. PANGERAN KHAIRUL SHALEH, M.M.):

Waktu tinggal 13 menit. Nanti jam 12 kita ada rapat lanjutan lagi.

Satu menit ya, Ibu, ya, silakan.

Baru datang *ngomel nih*.

F-P. GERINDRA (HJ. SITI NURIZKA PUTERI JAYA, S.H., M.H.):

Terima kasih, Pimpinan yang sangat bijak.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua,

**Yang saya hormati Pimpinan serta rekan Komisi III,
Yang saya hormati Bapak Menteri Hukum dan HAM RI,
Para Dirjen dan seluruh jajarannya,
Yang saya hormati Bapak Kepala BNPT, serta seluruh jajarannya.**

Yang pertama-tama saya ingin mengapresiasi terlebih dahulu, Pak, terkait peradikat WTP yang sudah 14 tahun berturut-turut dan target selanjutnya pun WTP di tahun 2023 ini.

Saya juga ingin mengapresiasi PNBP, Menkumham Unit Dirjen Imigrasi sebesar 230 persen, yang mencapai 4,6 triliun, dan pada Dirjen

Pemasyarakatan sebesar 50 persen..., 506 persen, mencapai 33 miliar. Ini merupakan hasil kinerja terbaik di rekan-rekan Menkumham.

Selanjutnya, saya ingin fokus ke beberapa hal. Yang pertama, untuk Dirjen Imigrasi, ada potensi kehilangan PNBPN sebesar 3 triliun per tahunnya, jika kebijakan bebas visa kunjungan diterapkan kembali.

Menurut saya, ini menjadi perhatian prioritas untuk Dirjen Imigrasi, mengingat PNBPN ini merupakan pemasukan khas negara kita, tetapi keamanan dan pertahanan sistem imigrasi pun juga menjadi nomor satu, Pak. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Bapak Dirjen Imigrasi bisa membuat terobosan terkait hal itu?

Lalu, selanjutnya, untuk Ditjenpas, bagaimana serapan anggaran di tahun 2023, Pak, melihat Ditjenpas ini mengusungkan anggaran tambahan sebesar 1,3 triliun. Ini angka yang cukup besar, namun saya sangat mengerti akan kebutuhan unit kemasyarakatan di seluruh Indonesia pun cukup tinggi.

Mengingat *overcrowded* di lapas-lapas di seluruh Indonesia yang rata-rata hampir 300 persen dari jumlah warga binaan, ini membutuhkan belanja anggaran operasional yang optimal guna terciptanya warga binaan yang tercukupi akan kebutuhannya. Mengingat warga binaan pun bukan hanya laki-laki dan wanita, namun juga anak-anak di bawah umur, serta ibu dengan balita yang sedang menyusui. Kebutuhan ini merupakan prioritas utama, Pak, agar kebutuhan tersebut dapat dipenuhi.

Lalu, yang kedua, untuk BNPT, saya pun ingin mengapresiasi BNPT juga mendapatkan WTP selama 10 tahun berturut-turut.

Selanjutnya, saya ingin fokus pada tabel program penanggulangan terorisme bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi. Di dalamnya terdapat program deradikalisasi di dalam lapas dengan anggaran 18 miliar dan deradikalisasi di luar lapas dengan anggaran 15 miliar.

Melihat angkanya deradikalisasi di luar lapas anggarannya lebih kecil dibanding di dalam lapas, apakah penempatan anggaran tersebut sudah tepat, Pak, mengingat potensi-potensi terorisme yang sesungguhnya itu ada di luar lapas.

Lalu, saya juga melihat ada program kontradikalisasi dengan anggaran sebesar 21 miliar. Saya ingin bertanya, apa bentuk *real* dari program tersebut dan apa perbedaannya dengan dua program yang awal tadi saya sampaikan?

Yang saya tekankan di sini, kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap terorisme itu penting, pembelajaran terhadap antisipasi pun tidak kalah penting.

Di tabel ini saya juga lihat ada operasi intelijen pencegahan sebesar 25 miliar. Lalu, di dalam penindakan dan pembinaan kemampuan juga dimasukkan program operasi intelijen jaringan terorisme sebesar 49 miliar. Mungkin saya butuh penjelasan lebih dari Pak Kepala BNPT terkait program-program ini, mengingat kami komisi III akan mempertanggungjawabkan anggaran ini ke publik.

Sebagai penutup, perlu diingat sekali lagi, saya Siti Nurizka Puteri Jaya dari Fraksi Gerindra, mendukung penuh usulan anggaran BNPT serta Kementoham di tahun anggaran 2024 ini.

Demikian, Pimpinan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (IR. PANGERAN KHAIRUL SHALEH, M.M.):

Baik,

Bapak-ibu, hadirin yang berbahagia,

Sudah banyak sekali, Pak Meteri, Kepala BNPT, pertanyaan kawan-kawan.

Silakan, Pak Menteri, mungkin ada penjelasan yang ingin disampaikan.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PROF. YASONNA H. LAOLY, S.H., M.SC., P.HD.):

Baik, terima kasih, Bapak-Ibu sekalian Anggota Komisi III, atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan kepada kami. Terima kasih atas usul saran.

Yang pertama, saya sampaikan bahwa khusus mengenai Hapsem, hasil pemeriksaan BPK, rekomendasi BPK yang disampaikan dan yang ditanyakan itu sudah selesai 91,80 persen. Itu sebabnya kita dapat WTP, Pak. Jadi, sudah kita jawab itu. Itu yang pertama.

Yang kedua dari Pak Safrudin, bagaimana meningkatkan PNPB ini, apa yang diinginkan? Diinginkan tentunya, Pak Saf, mendukung kebijakan-kebijakan Kementerian Hukum dan HAM. Pertama, tadi sudah dijelaskan, sekarang saya jawab yang juga ada beberapa pertanyaan karena hampir

bersentuhan dan bersamaan. Potensi di imigrasi itu hilang 3 triliun, itu bisa lebih.

Kalau kita hitung-hitung bukan hanya 3. Kalau sekarang, dengan Covid justru kita menambah penghasilan per sekarang ini sudah 4,7 triliun hanya dari imigrasi, passport, dan visa karena kita menerapkan visa *on arrival*. Kemudian, visa *on arrival* itu juga pembayarannya sudah bisa dilakukan di luar negeri, visa *online*.

Kalau dulu antrian untuk membayar VOA, visa *on arrival*, sekarang tinggal bayar dari luar negeri pakai kredit card, dimudahkan. Dulu kita masih ingat dan sering ada 169 negara yang kita kasih bebas visa. Dengan Covid, itu kita batalkan sama sekali, makanya ada lonjakan penerimaan PNPB. Kalau itu dikembalikan, *nah* itu yang kita katakan potensi *loss*, itulah yang disebut oleh BPK.

Kami sudah membuat kajian, sudah ada rapat bahkan ratas mengenai hal ini. Prinsip kita adalah, benar, bahwa untuk itu harus ada, pertama dulu untuk memberikannya, pertama, harus resiprokal. Tadi cerita tentang China. Pergi ke China begini. China sekarang masuk harus VOA, harus membayar visa, tidak *free*. Dulu *free*, sekarang harus bayar.

Hanya beberapa negara ASEAN yang..., ada beberapa passport diplomatik dan lain-lain, yang sama seperti kita kalau passport diplomatik dan beberapa negara passport dinas bisa, tapi yang lain pada umumnya, Australia dulu *free*, sekarang mereka harus bayar VOA. Harganya tidak mahal, hanya 500..., 500 ribu saja, *which is* kalau dibandingkan dengan tiket dan lain-lain, *meaning means nothing*, tapi buat kita itu sangat besar sekali.

Saya katakan, akhir tahun ini bisa mencapai 6 ke 7..., 7 triliun mungkin. *That's a big number*. Jadi, terima kasih dukungannya.

Kalau nanti dalam pembahasan-pembahasan itu kita harus untuk bebas visa, resiprokal, bermanfaat untuk negara, dan tidak mengandung potensi bahaya. Ini kebijakan kita yang akan kita terapkan nanti. Di ratas kemarin agak alot pembahasannya.

Jadi, kenapa ada yang melihat, oh, ini kalau masuk, banyak masuk potensi *multiplier effect* di..., di..., apa..., di daerah, tetapi pelajaran dari beberapa negara, kita masuk ke Australia, saya baru pulang dari..., apa..., dari Praha, Praha itu daerah Ceko, sangat indah, penduduknya hanya 10 juta, tapi turisnya 25 juta karena memang sudah *built in* infrastruktur, dia unik, dia bagus, dia ini. Jadi, infrastruktur para wisata memang harus kita siapkan.

Kalau sudah bagus, orang mau dibayar berapa pun akan ke Bali karena sudah infrastruktur semua siap. Sekarang *double decker, airbus*

double decker every single day dari Emirates masuk ke Bali. Bali sudah pulih, bahkan melebihi dari status sebelum Covid. *Nah*, ini barangkali perlu dukungan dari teman-teman ya.

Juga, tadi ada pelayanan seperti di Singapura, kalau kita bangun *auto gate* dengan *top of the line*, bisa kita lakukan, bisa. Tapi, kan kita juga terikat kepada..., kami sedang meminta surat dari Kemenkeu, kita terikat kepada konten PNB..., apa..., PMDN dalam peralatan-peralatan kita..., apa..., TKDN. Kalau PMDN itu namanya muda lasing. TKDN-nya. Jadi, ini harus ada *treatment* khusus karena kita sudah dapat 4,7 triliun. Tentu sistem ini harus dibangun cepat, harus nanti orang masuk, bisa jangan *setback* lagi kita.

Besar jumlah orang masuk, antrian panjang, kadang-kadang sistem..., apa..., sistem bisa *ngadat* atau apa..., listrik atau apa, ini membuat persoalan-persoalan. Untuk itu, barangkali dalam hal..., tidak..., untuk meningkatkan PNBP kita harus *invest*, kita harus invest dalam pelayanan publik, dalam anggaran, dalam aplikasi, dalam system, dan lain-lain. Untuk itu, perlu dukungan dari Bapak-Ibu sekalian.

Nah, ini soal, misalnya pasar Babakan. Mengapa itu ada potensi? Memang pasar Babakan itu dari dulu dikuasai sebagian masyarakat. Sebagian kami hibahkan ke kantor polres..., apa..., Polres Tangerang karena dikuasai masyarakat, Pak. Supaya polisi yang ngurusnya, ya, kita kasih aja sama polisi.

Nah, nggak ada yang berani sama polisi ternyata. Dia kosongin itu barang dan dia bangun kantor polres di situ. *Nah*, di tempat-tempat lain ada yang dikuasai masyarakat. *Nah*, sekarang kita sudah menangkan dalam pengadilan, tinggal kita nanti akan selesaikan. Secara perlahan dan bertahap.

Kumham ini besar sekali asetnya, Pak. Nusakambangan itu 120 ribu hektare diperkirakan. Baru tersertifikasi itu satu koma dan dia selalu menjadi persoalan kami dari segi aspek BMBN-nya..., BMN-nya. *Nah*, syukur *alhamdulillah*, yak an, menteri..., apa..., sekarang, menteri ATR sekarang, saya surati, saya *approach*, saya ini, proses sertifikasi yang itu akan tuntas tahun ini, kita harapkan 100%. Hanya memang PNBP-nya dikosongin juga. Kalau dibayar, bayar PNBP 120 ribu hektar itu '*bengek*' juga itu. Bisa habis uang kita nanti. *Nah*, itu dari dulu jadi soal. Sekarang dengan pendekatan, dengan pengertian, itu bisa selesaikan. *One step at a time*. Persoalannya banyak.

Kementerian ini sekitar 881 satker, Pak. Mengelola keuangannya ada yang diputusi bahwa ada yang kadang-kadang ada satu satker tidak tahu kita nama satkernya, tapi tidak tahu kita dimana, kabupaten apa, kecamatan apa, saking besarnya di kampung-kampung, di mana-mana.

KETUA RAPAT (IR. PANGERAN KHAIRUL SHALEH, M.M.):

Pak Menteri, saya perpanjang dulu 15 menit, perpanjang 15 menit ya.

(RAPAT: SETUJU)

lanjut.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PROF. YASONNA H. LAOLY, S.H., M.SC., P.HD.):

Jadi, itu. Jadi, PNPB Kemigrasian saya kira sudah ini.... *Nah*, bagaimana..., oh, peralatan Ditjen Pas rusak 200 miliar.

Memang *udah* tua, Pak, *udah off-kir* seharusnya, perlu diganti baru. *Nah*, itu tetap menjadi BMN negara, tapi sudah rusak dan sekarang kita proses penghapusan. Sudah disetujui karena barang-barang itu walaupun sudah rusak lama tidak boleh langsung dibuang sebelum penghapusan. Itu menjadi kerugian negara, itu bisa persoalan nanti. Maka barang-barang itu di gudang, di..., apa semua, di..., ini..., rusak, tidak bisa lagi dipakai.

Ada yang dipakai, ada yang bisa di-*upgrade*, di-*upgrade*. Tetapi, ini kami dalam proses penghapusan barang-barang lama yang sudah memang..., sudah saatnya untuk harus *direnova*..., harus diganti yang baru.

Kalau nanti X-ray dipakai yang sudah usang, dimasuk orang di situ, mungkin tidak bisa lagi mendeteksi yang sesungguhnya, ya kan? Sudah rusak maka *udah*..., karena uzur karena masa pakainya memang sudah selesai. Tapi, itu kan tetap BMN, tetap BMN yang di dalam..., apa..., dalam daftar BMN kita terdaftar maka..., mengapa tidak, BMN ini tidak bisa digunakan, sudah rusak. Dihitung itu termasuk bagian kerugian, bagian..., apa..., itu harus dihapuskan. *Nah*, ini soal itu, Pak.

Kemudian, UMKM. *Nah*, Ditjen KI bagaimana sistemnya supaya dapat kehilangan ini sampai triliun.

Pak, 64 juta UMKM kita sekarang ini, hanya kita berbicara UMKM. Kami dorong terus. Tahun ini adalah tahun merek ya. Tahun merek dengan *one brand for one village, one village one brand*. Enam puluh juta UMKM yang terdaftar itu punya KI, baru 10%, Pak. Makanya, saya sosialisasi.

Kemarin saya dari Bali, dengan program satu jam bersama Menkumham. Kita jelaskan kekayaan intelektual, kita jelaskan perseroan terbatas, kita dorong ini. Pemerintah daerah juga supaya mendaftarkan indikasi kekayaan geografisnya. UMKM daftarkan mereknya. Jangan nanti sesudah jadi barang itu....

Saya syukur Ajik Krishna sudah mendaftarkan 34 mereknya. Empat lagi yang belum. Ajik adalah salah satu contoh sukses. Pendidikannya cuma S2, tapi mampu membuat 34 outlet. Maksudnya S2 itu, Pak, SD SMP. Itu yang dia bilang, "Saya cuma S2, bekas tukang cuci mobil, doorsmir." Tapi, dia punya..., dan dia kerjasama terus. Dia mengerti arti merek. Dia daftarkan sudah 34.

Tiga puluh empat kan dapat PNBPN. Jadi, kalau 64 juta potensi UMKM, kalau kita rebut *aja* mereka sadar..., sadar merek, kue-kue mereka atau outlet-outlet mereka terdaftar dengan baik, katakan tambah 10% lagi, berapa PNBPN?

Nah, ini yang potensi-potensi ini kan, bagaimana kita secara bersama-sama meng..., me..., menangkap itu dengan sosialisasi, dengan program.

Hak cipta sudah online, POP HC setelah kita ciptakan sudah langsung lonjakan yang mendaftarkan hak cipta. Merek sudah otomatis, pendaftaran hak merek mempercepat itu. Tapi, merek belum bisa kita buat langsung satu bulan karena undang-undang..., undang-undang mengatakan tig..., enam bulan?

Ya, bisa kita apa, hanya jadi undang-undang. Mungkin revisi undang-undang nanti, apalagi dengan digitalisasi, kan, undang-undang lama, Pak, sekarang karena kalau dulu tidak digitalisasi, kan, periksa satu-satu. Tapi, batas itu kita harus lakukan. Itu yang mengenai....

Sekarang mempercepat transformasi ekonomi dari Pak Muhajirin, Gerindra, walaupun orang tidak ada, tapi saya jawab *aja*, Pak. Memang koordinasi dengan potensi, itu sebabnya kita buat undang-undang tumpang tindih, Undang-Undang Hak Cipta kita buat, Undang-Undang Sektor Jasa Keuangan kita buat, memangkas beberapa peraturan kita buat, kita buat sistem apa namanya..., *omnibus law*, terakhir ini Undang-Undang Kesehatan, Pak. Jadi, ini adalah upaya-upaya dari pemerintah untuk..., untuk mempercepat karena banyaknya tumpang tindih dalam peraturan perundang-undangan.

Terima kasih usul-usulnya.

Dan, yang..., INI (*Ikatan Notaris Indonesia*) dari Pak Supriansa. saya juga INI, masalah INI, Pak, memang ini...

KETUA RAPAT (IR. PANGERAN KHAIRUL SHALEH, M.M.):

Eenggak ada Pak Suprinya, Pak, lewat *aja*, Pak Menteri.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PROF. YASONNA H. LAOLY, S.H., M.SC., P.HD.):

Enggak apa-apa, Pak, INI ini, INI bandelnya bukan main. Yang terakhir ini kami sudah kirim surat, jangan laksanakan karena kami mengirim surat kepada PP ini suratnya tanggal 18 Agustus. Kita sepakat *e-voting*, tetapi pelaksanaannya harus mengakomodasi PP INI dan Pengwil yang 24. Kita kirim surat, tetapi PP INI melaksanakan sendiri. Ya, kalau mereka melaksanakan sendiri, tidak turut dengan kita, apa boleh buat, kita juga tidak bisa..., daripada bekelahi. Ya, kita tidak akan mungkin me..., apa itu..., apalagi keputusan raker dengan Komisi III kan menyepakati, menggabungkan, dan mengakomodasi semua, tidak boleh mentang-mentang, dan ternyata jumlah yang hadir juga menjadi masalah ya. Nanti akan kita cari jalan keluar yang terbaik. 'Kucari jalan terbaik', kira-kira begitu, Pak.

Jadi, berat memang. Saya minta, Pak, barangkali sudah tiba saatnya, sama dengan IDI, sama dengan..., sama dengan advokat. Kita buat organisasi advokat itu satu, PERADI dulu. Ini para advokat, tapi jangankan IKI dan lain-lain, PERADI saja pecah perantakan, Pak, empat. Ada versinya Oto, ada versinya Juni..., apa..., bukan Junimart, Luhut, Juniver, ada yang lain.

Itu..., maka berangkat ini sudah saatnya ini masuk prolegnas. Buka saja, Pak, untuk apa bikin satu? Manfaatnya apa? Kalau..., kita jadi bertanya, apa yang dikejar di situ, rupanya, hebat *kali* rupanya karena sudah hampir seperti berebut kekosongan parpol, Pak.

Parpol saja bisa kita selesaikan kan? Golkar, PPP aman-aman kan? Walaupun sekarang PKB agak sedikit..., apa ya..., membuat.... Biasalah politik. Tapi, kalau organisasi seperti ini, Pak, *wah*, menyelesaikannya ruwet, sampai datang ke Komisi III berkali-kali, ke mana-mana, kirim surat ke segala penjurur. Kita bilang, udahlah damai.

Kalau kepemimpinan itu baik, pasti tidak ada masalah. Kalau kepemimpinan itu ditentang oleh banyak orang, *something wrong with it*. Prinsip saya begitu, Pak. Kita harus selesaikan dan tidak boleh *absolut*, harus mengakomodasi.

Nah, ini yang soal ini, Pak. Jadi, pada umumnya saya kira.... Saya terima kasih atas dukungan untuk tambahan anggaran. Saya sangat mengapresiasi.

Terima kasih, Pak Taufik Basari, HAM ya, dukungannya kepada penambahan HAM, terima kasih. Kami akan terus melakukannya.

Juga tentang..., termasuk Pak Nasir, sahabat saya, sudah lama....

KETUA RAPAT:

Tidak ada, Pak Menteri,

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PROF. YASONNA H. LAOLY, S.H., M.SC., P.HD.):

Tidak ada, tapi kita ini kan walaupun tidak ada, kita hargai sedikit-sedikit, Pak. Jadi, soal bantuan hukum, soal bantuan penambahan bantuan hukum dan sadar hukum, kita sepakat. Memang di Desa Sadar Hukum itu nanti akan kita pikirkan bertahap anggarannya.

Soal bantuan hukum, Indonesia mendapat penghargaan *the best* dalam *open government* tentang pelayanan hukum untuk masyarakat tak mempunyai karena kita punya program bantuan hukum dan Ditjen KBPHN sudah berangkat ke Estonia.

Seharusnya saya yang berangkat ke Estonia, Pak, atau Menteri Bappenas. Menteri Bapenas tidak bisa, saya tidak bisa karena baru pulang, jangan ke luar negeri saja. Jadi, kita kasih. Tapi, penghargaan ini sangat prestisius, Pak. Penghargaan ini sangat prestisius dalam *open government*. Memberikan *open government* perhatian kita kepada bantuan hukum kepada orang-orang.

Nah, dukungan Komisi III untuk bantuan-bantuan hukum ini, kita ada program paralegal di BPHN. Kita bekerjasama dengan 300 kepala desa. Kita didik, Pak, 300 kepala desa untuk pendidikan paralegal supaya mereka bisa membuat penyelesaian-penyelesaian di daerah *alternative conflict resolution*. Daripada mendorong-dorong perkara di bawah, di desa-desa, kita ajari para kepala desa untuk mendamaikan mereka.

Jangan nanti gara-gara satu kerbau bisa rugi lima kerbau karena ego. Jadi, paralegal ini kita akan terus bina, Pak. Dan kita itu dididik, gurunya dari Mahkamah Agung, dari hakim, dari pengacara kita. Jadi, ini program-program yang tentunya memerlukan penguatan dari teman-teman Komisi III. Tentu perlu mendapat penguatan dari Komisi III. Mungkin Taufik Basari nanti menjadi salah seorang pengajarnya.

Terima kasih bahwa untuk sosialisasi kita sudah masuk ke..., ke ini, Pak Taufik, ke penegak hukum. Jadi, walaupun anggarannya di..., ada di PP, Dirjen PP agak kurang karena ini *dhuafa*, Pak, ada *dhuafa*. Jadi, nanti akan *supporter*-nya itu kaum yang kaya-kaya, punya PNB, AHU, KI, *gitu*. Kita tarik dari situ karena sekarang, Sekjen..., PNB dari kolektor bisa ditarik sebagian untuk dibagi kepada kaum *dhuafa*, kira-kira *gitu*. Jadi, jangan..., jangan

apa..., jangan..., jangan egois, kira-kira, *gitu*. Itu *melu...*, terima kasih, itu melalui perubahan Undang-Undang PNBPN kita yang lalu.

Dulu kan tidak. Pengepul di situ, tukang kepul ini yang membelanjakan semua, akhirnya apa? karena banyak uangnya, dibikinnya program-program yang aneh-aneh, kan? Jadi, menjadi tidak efektif. Sekarang kita kontrol secara..., secara baik.

Jadi, saya kira, *overall* saya kira, saya sudah menjawab, walaupun kurang-kurang *sikit* dimaafkan saja karena waktunya sudah setengah satu. Ada yang lebih hebat nanti rapat kerja Pak Ketua di sini.

Terima kasih, sekali lagi atas perhatiannya, Pak, terima kasih usulnya. Jadi, kita akan tambah. Kita usahakan nanti Desa Sadar Hukum, Pak Djamil. Walaupun Bapak nggak ada, saya jawab juga tadi.

Terima kasih, Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT (IR. PANGERAN KHAIRUL SHALEH, M.M.):

Terima kasih, Pak Menteri.

Sebelum ke BNPT, saya perpanjang 15 menit lagi.

Silakan.

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (KOMJEN POL. PROF. DR. H. RYCKO AMELZA DAHNIEL., M.SI.):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Izinkan saya untuk memberikan penjelasan atas beberapa pertanyaan, penguatan, dan juga dukungan yang diberikan oleh para anggota Dewan sekalian.

Yang pertama, ucapkan terima kasih kepada Bapak Jenderal Safarudin atas dukungan, atas penambahan penguatan program prioritas dalam rangka rencana aksi nasional terhadap pendanggulan terorisme di Indonesia. Kami laporkan, Bapak, untuk peningkatan asesmen pegawai terhadap BUMN, ini sebenarnya sudah menjadi penugasan reguler. Akan tetapi, dengan kejadian kemarin, kami memasukkan dalam program prioritas dan kami juga mengajukan dukungan anggaran tambahan untuk kegiatan tersebut.

Kami laporkan, dengan jumlah anggota BNPT yang terbatas, hanya 15 orang yang memiliki sertifikasi untuk melakukan asesmen, dibandingkan dengan 961 objek vital yang ada, tentunya kemampuan tidak sebanding. Kami tidak bisa melakukan secara sekaligus melakukan asesmen.

Sesuai dengan tugas BNPT, BNPT melakukan asesmen, yang pertama, kepada sistem keamanan daripada objek vital; terus yang kedua, melakukan asesmen terhadap personil. Terhadap sistem keamanan, 961 objek vital yang baru selesai kita lakukan asesmen baru 23. Empat belas di antaranya sudah mendapatkan sertifikasi. Sisanya, bukan kita tidak laksanakan, kemampuan anggotanya belum cukup karena paling sedikit anggota harus dua minggu melakukan asesmen sistem keamanan.

Kemudian yang kedua, untuk melakukan asesmen terhadap personil. Kami akui, memang belum ada payung hukum yang mengikat bahwa semua personil di objek-objek vital harus dilakukan asesmen. Payung hukumnya tidak ada.

Selama ini permintaan asesmen terhadap personil hanya dilakukan kepada eselon 1, eselon 2, dan para direksi saja. Apabila akan menjadi direksi, menjadi eselon 1, baru ada permintaan kepada BNPT. Sedangkan kepada anggota ke bawah tidak ada.

Oleh karena itu, kami membuat program khusus ini, program khusus kami yang kami usulkan dalam kesempatan ini adalah untuk melakukan asesmen terhadap petugas-petugas di objek vital dan BUMN yang memiliki resiko tinggi. Yang di mana tugas-tugasnya ini, apabila melakukan sabotase akan menimbulkan kerugian yang besar, jumlah korban yang besar, dan juga kerugian negara yang besar sehingga bisa menghentikan proses perekonomian nasional, seperti itu. Ini kami sudah lakukan seperti itu.

Secara singkat, dengan PT Kereta Api, kami sudah mempunyai MoU. Kami sudah lakukan, kami sudah melakukan inventarisasi tugas-tugas yang memiliki resiko tinggi di situ dan bertahap kami sudah melakukan proses asesmen seperti itu.

Kemudian, Pak Jenderal Safarudin, terima kasih mengenai..., masukan mengenai tempat ibadah atau rumah sakit. Dalam kesempatan yang baik ini, kami juga kepada Pimpinan dan seluruh Anggota, kiranya kita perlu memiliki mekanisme kontrol terhadap penggunaan atau penyalahgunaan tempat-tempat ibadah yang digunakan untuk menyebarkan paham radikalisme.

Kami sudah melakukan studi banding kepada beberapa negara, kepada tetangga kita di sebelah, Singapura dengan Malaysia, seluruh tempat ibadahnya itu terkontrol, *under control* pemerintah, siapa yang bisa berbicara dan apa kontennya. Demikian juga negara-negara Timur Tengah, di Oman, di

Qatar, Saudi Arabia yang sudah kami datangi. Kemudian, termasuk di Maroko yang kita datangi. Semua masjid, tempat ibadah, petugas di dalam yang memberikan *tausiyah*, memberikan *khutbah*, memberikan materi, termasuk kontennya dibawah kontrol pemerintah.

Mungkin dalam kesempatan yang baik ini kita perlu memiliki sebuah mekanisme untuk melakukan kontrol terhadap seluruh tempat ibadah, bukan hanya masjid, tapi semua tempat peribadatan kita. Siapa saja yang boleh memberikan, menyampaikan konten di situ, termasuk mengontrol isi konten supaya tempat-tempat ibadah kita ini tidak dijadikan alat untuk menyebarkan ajaran-ajaran kekerasan, ajaran-ajaran kebencian, menghujat golongan, pimpinan, bahkan menghujat pemerintah.

Kita perlu belajar kepada negara-negara tetangga kita, Singapura, Malaysia, negara-negara Timur Tengah, negara-negara di Afrika pun mereka sudah memiliki mekanisme kontrol terhadap tempat-tempat ibadah ini karena demikian masifnya penggunaan tempat ibadah untuk melakukan proses radikalisasi.

Kemudian, yang berikutnya kepada Bapak Rahmat Muhajirin dari Gerindra.

Masih ada gak neliaunya?

Beliau tadi ada di sebelah sana, tapi sudah tidak ada.

Di *slide* 13-16 yang sudah kami bagikan sudah ada pembagian anggaran untuk kedeputian. Sudah ada.

Kemudian dari Golkar, Pak Haji Rudy Mas'ud.

Masih ada gak ya?

Sudah tidak ada ya? Lewat.

Kemudian dari Nasdem, Pak Taufik Basari.

Pak Taufik, Program Moderasi Beragama. Program Moderasi Beragama ini kami laporkan ada program reguler, ada program prioritas, Pak.

Yang regular, kami lakukan adalah dengan menggunakan kontradikalisasi, Pak, secara *online* maupun *offline*. Kami juga menggerakkan, memiliki FKPT di semua provinsi, untuk kita moderasi, ada Duta Damai. Sedangkan program prioritas yang kami perlu dukungan daripada Anggota Dewan ini adalah program Desa Siaga, Pak, membangun ketahanan desa dalam angka meningkatkan moderasi daripada agama di

situ, Pak. Kemudian, memperkuat ketahanan desa untuk tidak mudah tersusupi, Pak, masuknya ideologi radikal, ideologi ekstremisme, reguler radikalisme, dan terorisme di situ, Pak.

Kemudian yang kedua adalah program membangun ketahanan sekolah, yang disebut dengan Sekolah Damai. Kami bersama dengan Wahid Foundation membangun Sekolah Damai. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan sekolah dalam pembangunan moderasi, Pak, membangun toleransi di sana, Pak, termasuk penyusupan.

Kami laporkan dalam kesempatan ini baik ini, Pak, hasil daripada IKHub Indonesia Knowledge Hub BNPT Outlook 2023, kami ada 91 kontributor peneliti di situ, Pak. Kami melakukan peneliti dalam semester pertama tahun 2023 ini, Pak. Terjadi peningkatan, Pak.

Terjadi peningkatan migrasi dari kelompok, dari anak-anak sekolah kita, Pak, dari lima kota besar terhadap anak SMA, Pak. Terjadi peningkatan satu digit dari yang toleran menjadi intoleran pasif. Yang pasif menjadi aktif, yang aktif menjadi terpapar, Pak. Ini jadi penemuan kami. Oleh karena itu, salah satu program prioritas yang kami usulkan di sana, Pak, untuk membangun moderasi beragama di sekolah Pak, kami melakukan..., membuat program namanya Sekolah Damai tadi, Pak. Sekolah Damai untuk bantuan ini.

Kemudian untuk program dukungan anggaran derad di dalam lapas, Pak, ini memang kami melakukan sinergi, Pak, sinergi dengan Ditjen Lapas.

Ya, kami saling memperkuat, Pak, saling memperkuat untuk melakukan proses deradikalisasi di dalam lapas. Bukan hanya dengan lapas, tapi dengan densus, Pak, selama dalam proses penahanan.

Kemudian, kami laporkan juga dalam kesempatan ini, untuk yang di luar lapas, saat ini ada kurang lebih 1.400-an, Pak, mantan napiter yang sudah keluar dari lapas, tersebar di seluruh Indonesia.

Kami memiliki program, Pak, yang pertama adalah merubah *mindset*, Pak. Meskipun di dalam lapas mereka itu sudah dilakukan program deradikalisasi, gabungan antara BNPT dengan Ditjen Pas, tapi setelah mereka keluar, Pak, dalam tahun ini saja, Pak, sudah 14 yang keluar dan semuanya masih dalam kategori merah, Pak, keras semuanya. Jadi, salah satu tantangan kita adalah, Pak, bahwa pendekatan dalam pemberian hukuman kepada para narapidana teroris kita, Pak, masih menggunakan pendekatan hukuman badan, Pak, hitungan 10 tahun, 20 tahun.

Berbeda dengan tetangga kita, Pak, Singapura, Malaysia, dan negara-negara Timur Tengah, termasuk Maroko, Pak, Afrika Utara. Pemberian

hukuman itu bukan dihitung berdasarkan penghukuman badan 10 tahun, tapi yang dihukum adalah bagaimana mengembalikan cara berpikir, yang *mindset*-nya, Pak.

Kalau kita, Pak, dihukum 8 tahun, hukum 10 tahun, antara ideolog, antara rekruter, bomber, simpatisan, hukumannya kadang-kadang sama, Pak. Yang berbahaya, kan, ideolog *ama* rekruter, Pak. Kalau bomber ini sebetulnya korban, Pak, korban daripada hasil rekruter ini. Si ideolog *ama* rekruter ini belum tentu berani jadi bomber, Pak, jadi korban.

Nah, kita di sini, Pak, kami terus berkoordinasi dengan MA di sini, Pak. Mohon bantuan dari Bapak-Bapak dari Komisi III DPR ini, Pak, bahwa kita ini masih menggunakan pendekatan hukuman terhadap badan, hitung-hitungan tahun, 8, 10, 11 tahun. Sementara, Pak, yang kita tangani bukan hukuman badannya kepada mereka, Pak, tapi cara berpikirnya.

Ini tetangga-tetangga kita, negara-negara tetangga kita sudah melakukan perubahan, Pak, pendekatan dalam pemilihan hukuman ini. Bagaimana mengembalikan *mindset*-nya, Pak, untuk melakukan bentuk menyetop budaya kekerasan tadi.

Nah, dalam program Derad kami, Pak, di BNPT, kita ada tiga program besar. Program pertama adalah mengembalikan *mindset*, bagaimana menyetop budaya kekerasan ini, Pak. Kemudian, yang kedua, adalah pemberdayaan. Tidak mudah bagi seorang mantan napiter setelah keluar dari lapas untuk mendapatkan pekerjaan, Pak, satu. Terus, yang kedua, juga tidak mudah untuk mengontrol keberadaan dia, Pak.

Singapura, untuk mengontrol keberadaan dia, Pak, kakinya dipasang gelang, Pak, dengan yang namanya *electric tagging*, Pak. Dipasang gelang, di rumahnya dipasang sensor. Ke luar dari sensor itu, tangkap lagi, Pak.

Kalau mau ke luar dari jarak sensor itu, dia harus lapor dulu kepada SB, Pak.

Nah, kalau kita, Pak, kita tidak punya mekanisme control, Pak, untuk mengontrol keberadaan mereka ini. *Nah*, salah satu cara kita untuk mengontrol adalah kita berikan..., kita bangun mereka satu paguyuban, Pak. Di antara paguyuban saling mengontrol. Kemudian, kita lakukan pemberdayaan. Kita beri dia keterampilan, kita berikan modal, kita berikan pekerjaan. Apa yang kami sedang kerjakan sekarang adalah membuat warung NKRI, kemudian kita membuat warung digital, Pak, dengan bekerja sama dengan Bukalapak.

Itu sebenarnya tidak saja untuk membantu mereka mendapatkan pekerjaan, tetapi juga untuk mengontrol mereka, Pak karena setelah keluar

dari lapas, *nggak* mudah buat mereka untuk bekerja, Pak, untuk dapat pekerjaan. Untuk menjadi TNI, menjadi Polri, jadi ASN, bahkan jadi tukang cuci di restoran *aja*, Pak, itu pemilik restoran mikir 10 kali itu, Pak, tukang cucinya mantan..., mantan teroris itu, Pak, seperti itu, Pak.

Dan, yang ketiga, Pak, programnya adalah memutus jaringan sosial ideologi terorisme yang turunnya oleh orang tua kepada anaknya, Pak. Ketika orang tuanya, bapak atau ibunya ditangkap oleh Densus, kemudian dimasukkan ke tempatnya Pak Reinhart, di lapas sana, Pak. Itu anak-anaknya itu, Pak, itu harus ada yang *ngontrol*, Pak.

Hampir 100% anak-anaknya teroris itu tidak sekolah di luar, Pak. Mereka sekolah sama orang tuanya, Pak sehingga ideologi teroris itu diturunkan dari orang tua kepada anak-anaknya.

Kalau mereka tidak kita lakukan kontrol kepada mereka, Pak, itu nanti mereka akan jadi 'anak bebek', Pak, istilah mereka itu dan kekuatan, daya gempurnya *double*, Pak.

Yang pertama, dia punya ideologi kekerasan; yang kedua, dia punya dendam, Pak, *defence*. Nah, oleh karena itu, dalam program ini kita perlu memutus akar sosial menurunnya ideologi teroris dari orang tua kepada anak-anak.

Yang masalahnya sekarang tidak ada anggarannya. Tadi kami sampai kepada Pak Jenderal Safaruddin. Anggarannya *nggak* ada, untuk menempatkan anak-anak itu mengambil dari orang tuanya, Pak, kemudian kita tempatkan di Moderat Islamic Boarding School, Pak, seperti itu, di bawah kontrol daripada BNPT. Anggaran *nggak* ada.

Yang kami lakukan sekarang apa, Pak? Kami membentuklah Yayasan, Pak. Kami membentuk yayasan Indonesia Damai. Bantuan dari CSR-CSR, teman-teman kita, Pak, anggarannya, kemudian kami berikan mereka beasiswa sekolah di sana, Pak. Dengan sedikit kami paksa, Pak, kami Tarik, kami cabut. Dia tidak boleh lagi belajar sama orang tuanya.

Ketika kami dulu masih di Densus, Pak, kalau kami *nangkep* Bapaknya, Pak, di rumahnya, kita *ngeledah* barang-barang rumahnya, Pak, itu anak-anaknya, dari anak 10 tahun, anak kecil, sampai anak SMA, itu *ngeliat* kita melotot, Pak, "*Toghut* datang, *thogut* datang," katanya.

Itu anak-anak, Pak. Mereka *nggak* ada yang sekolah di luar. Dia sekolah sama orang tuanya semua, Pak. Semua anak teroris sekolah sama ini, Pak. Oleh karena ini, harus kita putus, Pak, jaringan sosial tadi. Kami perlu anggaran tadi, Pak, di samping kami sudah membangun yayasan, bantuan dari CSR, kami juga akan lebih baiknya, seperti di Singapura, Pak, itu

yayasannya langsung di bawah kontrol pemerintah, Pak, swasta bisa bantu, tapi pemerintah yang menjadi utama, seperti di situ, Pak.

Kemudian, Pak..., dari Demokrat, masih ada, Pak Agung Budi Santoso. Terima kasih, Pak, dukungannya.

Kemudian, dalam rangka melaksanakan program deradikalisasi dan kontra radikalisme tentunya kami melaksanakan koordinasi, Pak, tidak sendiri BNPT. Kami dengan semua kementerian lembaga, dengan kominfo BSSN, Polri, Pak, melakukan koordinasi, Pak. Memang *coordination and collaboration easy to talk, but very hard to implement. Ngomongnya gampang, Pak, koordinasi, Pak, tapi menyatukan agak susah, Pak.*

Insya Allah, Pak, mudah-mudahan dengan tahun-tahun politik ini kita semakin gampang untuk koordinasi, seperti sampaikan Pak Menteri tadi.

Kemudian, Bang Nasir Jamil.

Insya Allah untuk hasil penemuan BPK, kami tidak pernah menganggap remeh. Meskipun sudah 100 %, semua sudah kami tindak lanjuti. Namun, demikian, kami sudah membangun suatu sistem, membangun sistem, mengeluarkan surat-surat edaran, surat-surat perintah, yang dikeluarkan oleh Bapak Sestama agar temuan-temuan itu tidak terjadi berulang, Pak. Tidak terjadi berulang. Ini kami lakukan.

Kemudian berikutnya, dari Pak Dimiyati, sudah nggak ada, lewat.

Bu Siti, sudah nggak ada, lewat.

Saya kira sudah selesai, Pak Pimpinan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (IR. PANGERAN KHAIRUL SHALEH, M.M.):

Baik, kita telah mendengarkan penjelasan Pak Menteri dan Kepala BNPT. Selanjutnya, tolong tayangkan kesimpulan. Saya bacakan kesimpulan.

1. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terrorisme Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022 serta tindak lanjut terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2022 untuk kemudian digunakan sebagai bahan dalam rapat selanjutnya.

Pak Menteri, setuju?

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Pagu Anggaran Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebesar 18.368.813.941.000 dan memperjuangkan usulan tambahan beserta program yang diajukan sebesar 1.817.686.181.000 sehingga menjadi Rp20.216.500.122.000.

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia atas Pagu Anggaran Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp465.227.141.000 dan memperjuangkan usulan tambahan sebesar program yang diajukan sebesar Rp46.477.395.000 sehingga menjadi Rp511.704.536.000.

Pak Rycko, setuju?

Pak Ryckonya belum setuju, jadi..., Oke setuju ya.

(RAPAT: SETUJU)

Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia,

F-P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.HUM., LL.M.):

Pimpinan,

Sebentar, pendek saja, tidak perlu dimasukkan dalam kesimpulan. Tadi paparan mengenai adanya kerjasama dengan beberapa pihak untuk mendukung program-program, menurut saya sebagai catatan kita dalam rapat ini penting untuk kita dorong bersama-sama untuk ditingkatkan, untuk program-program yang memang bisa bekerjasama dengan pihak-pihak lain. Tadi BNPT bisa bekerjasama dengan yayasan sekolah dan sebagainya, kalau Kemenkumham mungkin juga bisa bekerjasama dengan pihak-pihak yang bisa mendukung sosialisasi KUHP karena banyak juga pihak-pihak yang juga ingin diselenggarakan tanpa harus membebani beban anggaran dari Kemenkumham. *Nah*, itu juga bisa ditingkatkan.

Demikian.

KETUA RAPAT (IR. PANGERAN KHAIRUL SHALEH, M.M.):

Hadirin yang kami muliakan,

Dengan telah selesainya pembahasan materi rapat maka selesailah sudah seluruh rangkaian kegiatan raker pada hari ini. Apabila tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, rapat dapat kita akhiri dengan ucapan terima kasih atas segala perhatiannya dan kepada Pak Menteri kepada Kepala Badan BNPT.

Demikian, rapat kami skors hingga pukul tiga belas. Setelah ini akan dilanjutkan dengan Raker dengan Polri dan BNN.

Demikian.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.30)
(RAPAT SELESAI)**

a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

NOVIANTI, S.E.
NIP.196711041988032001